



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019  
GUNA Mendukung KEAMANAN NASIONAL**

**BAYU ANGGI NUGRAHA  
120190301007**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA**

**BOGOR  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Bayu Anggi Nugraha  
Nim : 120190301007  
Program Studi : Manajemen Bencana  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Judul Tesis : Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar  
Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019  
Guna Mendukung Keamanan Nasional

Pembimbing I



Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR

Kolonel Laut (KH) NRP. 11827/P

Tanggal: 02 Februari 2021

Pembimbing II



Dr. Fauzi Bahar, M.Si

Tanggal: 02 Februari 2021

Mengetahui

Dekan

Fakultas Keamanan Nasional

Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU.

Laksamana Muda TNI NRP. 8945/P

Tanggal: 02 Februari 2021

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Bayu Anggi Nugraha  
Nim : 120190301007  
Program Studi : Manajemen Bencana  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Judul Tesis : Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar  
Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019  
Guna Mendukung Keamanan Nasional

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing I Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR Kolonel Laut (KH)/NRP. 11827/P		
2	Pembimbing II Dr. Fauzi Bahar, S.Pd., M.Si Letkol Laut (P) (Purn)		
3	<i>Reviewer I</i> Dr. Yuli Subiakto, Apt., M.Si Kolonel Kes/NRP. 514594		
4	<i>Reviewer II</i> Dr. IDK Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQaR. Kolonel Kes/NRP. 516772		
5	<i>Reviewer III</i> Dr. Christine Marnani, M.AP Kolonel Laut (KH/W) (Purn)		

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah saya ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam bagian Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2021

Penulis,



Bayu Anggi Nugraha

NIM. 120190301007

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul: "Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Guna Mendukung Keamanan Nasional" telah selesai dengan baik.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI).

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU.
2. Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Bapak Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU.
3. Sekretaris Program Studi Manajemen Bencana Bapak Kolonel (Kes) Dr. IDK Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQaR.
4. Dosen Pembimbing 1 Bapak Kolonel Laut (KH) Bapak Dr. Panji Suwarno, S.E., M.Si., CIQnR dan Dosen Pembimbing 2 Bapak Dr. Fauzi Bahar, M.Si.
5. Dosen Penguji 1 Bapak Kolonel Dr. Yuli Subiakto, A.Pt., M.Si, Dosen Penguji 2 Bapak Kolonel (Kes) Dr. IDK Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQaR dan Dosen Penguji 3 Ibu Dr. Christine Marnani, M.AP.
6. Kedua orang tua yang peneliti banggakan dan sayangi Papa Marnizon Mukhtar (alm) dan Mama Adri Yohendri.

7. Kakak tercinta Wiria Dacova, A.Md, adik-adik peneliti yang sangat mandiri Tri Yogi Alandra, S.Sos dan Suci Anestra.
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu.
9. Keluarga MB Cohort X yang sangat luar biasa dan tangguh serta Keluarga Cohort XI Universitas Pertahanan yang solid.
10. Pak Wilopo, mas Jazmi, para dosen dan seluruh pegawai Universitas Pertahanan atas bantuan dan bimbingan kepada peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian cerita hidup peneliti, banyak memberikan semangat serta bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana pandemi atau wabah.

Bogor, Januari 2021



Bayu Anggi Nugraha

NIM. 120190301007

## ABSTRAK

### KAPABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 GUNA Mendukung KEAMANAN NASIONAL

BAYU ANGGI NUGRAHA

Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah terpapar bencana non alam pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menemukan kasus Covid-19 pertama pada 25 Maret 2020. Hingga pada November 2020 penyebaran pandemi Covid-19 telah meluas keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menuntut kapabilitas yang mumpuni dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai *leading sector* kebencanaan di daerahnya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 guna mendukung keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan berbasis teori manajemen bencana, teori kapabilitas, dan teori keamanan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penangananan Covid-19 di wilayah kerjanya belum maksimal, dimana terdapat kelemahan dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya adalah dengan melakukan penyemprotan desinfektan, penyuluhan kemasyarakatan, dan penerapan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Upaya tersebut belum berjalan optimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Peneliti memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya teknis dalam percepatan penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya dengan menambah jumlah dokter spesialis paru dan mengubah fungsi hotel dan gedung pertemuan sebagai rumah sakit penanganan Covid-19. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga dapat melakukan *Community Based Disaster Management* (CBDM) sebagai sebuah pendekatan yang mendorong komunitas dalam mengelola risiko bencana sebagai upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya.

Kata Kunci: kapabilitas, kabupaten tanah datar, *coronavirus disease* 2019, keamanan nasional.

## **ABSTRACT**

### **THE CAPABILITY OF TANAH DATAR GOVERNMENT IN HANDLING CORONAVIRUS DISEASE 2019 TO SUPPORT NATIONAL SECURITY**

**BAYU ANGGI NUGRAHA**

*Tanah Datar Regency is an area exposed to the non-natural disaster of the Covid-19 pandemic. Tanah Datar Government discovered the first Covid-19 case on March 25, 2020. Until November 2020 the spread of the Covid-19 pandemic had spread to all sub districts in Tanah Datar Regency. This requires capable capabilities of the Tanah Datar Government as the leading sector for disaster in the region. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 is expected to be able to assist Tanah Datar Government in breaking the chain of spreading Covid-19. This research aims to analyze the capabilities and efforts of the Tanah Datar Government in handling Covid-19 to support national security. This research uses a qualitative descriptive approach based on disaster management theory, capability theory, and national security theory. The results of this research indicate that the capability of the Tanah Datar Government in handling Covid-19 in its working area has not been optimal, where there are weaknesses in terms of human resources and technical resources. Tanah Datar Government effort in handling Covid-19 in its working area is by spraying disinfectants, community counseling, and implementing health protocols, namely by wearing masks, washing hands, and maintaining distance. These efforts have not run optimally, due to the lack of public awareness of the dangers of the Covid-19 pandemic by not implementing health protocols. Researchers provide recommendations to Tanah Datar Government, namely by improving the quality of human resources and technical resources in accelerating the handling of Covid-19 in its working area by increasing the number of pulmonary specialists and changing the function of hotels and meetinghouses as hospitals for handling Covid-19. Tanah Datar Government could also carry out Community Based Disaster Management (CBDM) as an approach that encourages communities to manage disaster risk as an effort to handle Covid-19 in its working area.*

*Keywords: capability, tanah datar regency ,coronavirus disease 2019,  
national security.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Desain Penelitian .....	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	37

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	40
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar .....	40
4.1.2 Gambaran Umum Bencana Non Alam <i>Coronavirus Disease</i> di Kabupaten Tanah Datar.....	47
4.2 Hasil Penelitian .....	51
4.2.1 Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 ....	51
4.2.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 ....	62
4.3 Pembahasan .....	65
4.3.1 Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 ....	65
4.3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 ...	79
 BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	 84
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Rekomendasi .....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	 86
LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP PENELITI .....	123

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Pantauan Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar .....	4
Gambar 2.1	Siklus Manajemen Bencana .....	14
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3.1	Skema Triangulasi Sumber .....	36
Gambar 3.2	Skema Sumber Informan Wawancara .....	37
Gambar 3.3	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	38
Gambar 4.1	Peta Sebaran Covid 19 Bulan Maret 2020 di Kabupaten Tanah Datar .....	40
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Nagari dan Jorong Per Kecamatan Di Kabupaten Tanah Datar .....	41
Gambar 4.3	Diagram Luas Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Kecamatan .....	42
Gambar 4.4	Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar .....	43
Gambar 4.5	Grafik Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Di Kabupaten Tanah Datar .....	46
Gambar 4.6	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Tanah Datar.....	47
Gambar 4.7	Grafik Pantauan Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar.....	49
Gambar 4.8	Peta Sebaran Covid 19 Bulan November 2020 di Kabupaten Tanah Datar .....	50
Gambar 4.9	Penyemprotan Desinfektan Oleh BPBD .....	54
Gambar 4.10	Penerimaan Bantuan Logistik APD Covid-19 .....	56
Gambar 4.11	Penyemprotan Desinfektan di Lingkungan Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung .....	58
Gambar 4.12	Penyemprotan Desinfektan dan Penerapan Protokol Kesehatan di Dangau Sawah Tengah Chanta .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian .....	31
Tabel 4.1 Ketinggian Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan.....	44

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hankam atau Pertahanan dan Keamanan Negara merupakan istilah yang kita pakai untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari setiap ancaman yang membahayakan kehidupan negara, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menuliskan bahwa tujuan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara pada tatanan kepentingan nasional strata mutlak adalah melindungi kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, dan menjaga keselamatan bangsa dari setiap upaya dan aktivitas yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara atau dalam kata lain ancaman pada segala bidang, baik militer atau non-militer. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan bangsa yang tertulis pada penggalan Pembukaan UUD 1945 dengan bunyi “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sistem pertahanan negara, ketahanan nasional serta keamanan nasional, ketiganya berkaitan satu sama lain. Keamanan nasional merupakan suatu kondisi dimana negara Indonesia ini tidak dalam kondisi terancam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu dimana negara dalam kondisi aman. Keamanan nasional juga merupakan kemampuan negara dalam menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia yang dalam hal ini ialah keamanan insani (*human security*) (Darmono, 2010), tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang sedang berada atau menetap di Indonesia. Keamanan nasional merupakan tanggung jawab dari pemerintah guna melindungi kedaulatan negara. Menurut Universitas Pertahanan, menjaga keamanan nasional juga sebagai upaya dalam menjaga eksistensi negara dalam menghadapi

ancaman Negara melindungi warganya dari ancaman nyata yang disebut sebagai bencana.

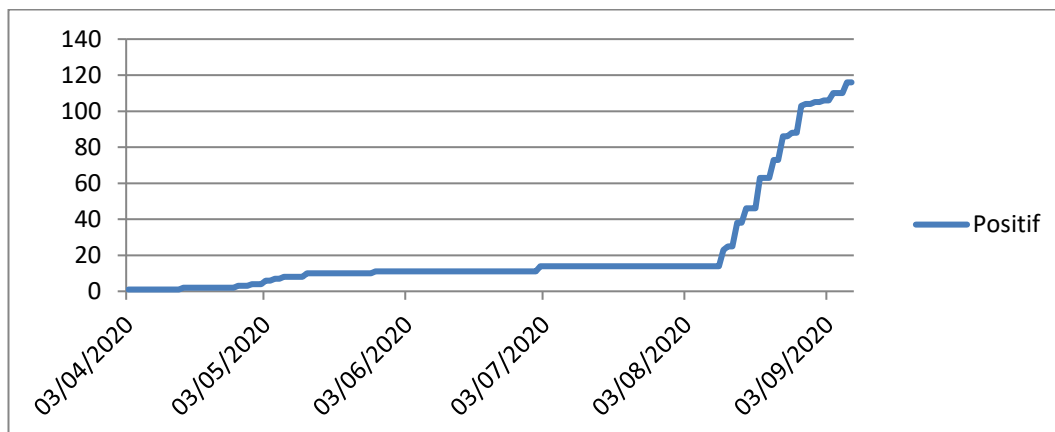
Indonesia merupakan negara yang tidak pernah terlepas dari bencana, baik alam, non alam, maupun bencana sosial. Terutama bencana alam yang menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, hilang, maupun kerusakan lingkungan juga hilangnya harta benda. Bencana merupakan fenomena yang kejadiannya akan berulang dalam kurun waktu tertentu, meskipun dalam jangka waktu yang sangat lama hingga kerap terlupakan oleh masyarakat. Anggapan masyarakat Indonesia mengenai bencana yang sering terjadi adalah bencana alam. Namun pada tahun 2020 ini, negara Indonesia juga negara-negara di dunia mengalami pandemi oleh virus *corona* yang disebut dengan COVID-19 (Adityo Susilo, 2020).

Bencanabermula dari merebaknya COVID-19 di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Kemudian terus tersebar ke negara-negara terdekat, kemudian ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai wabah pandemi karena telah menjangkit penduduk di lebih dari 200 negara dan total kasus hingga lebih dari 9.000.000 kasus (Aida, 2020) yang menjadikan adanya perubahan dari kehidupan sehari-hari yaitu adanya kekhawatiran dan kecemasan terhadap kesehatan dan keselamatan diri. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik global. Hingga tanggal 19 Juni 2020, secara global terdapat 8.385.440 kasus dengan 450.686 kematian. (Situation Report WHO, 2020). Wabah pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus positif COVID-19 yang pertama, hingga akhirnya melebar ke beberapa provinsi.

Statistik kasus COVID-19 yang tercatat di Indonesia sudah terkonfirmasi lebih dari 150.000 kasus, dengan pasien sembuh sebanyak 105.198 kasus dan pasien meninggal sebanyak 6.594 kasus (Gugus Tugas Covid-19, 2020). Salah satu provinsi yang terkena dampak dari virus corona yaitu Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Juni 2020 ditemukan 681 positif Covid-19, 423 sembuh, dan 30 meninggal di Sumatera Barat. (liputan6.com, 2020). Selanjutnya Kabupaten Tanah Datar yang biasa disebut dengan *Luhak Nan Tuo*, salah satu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga terkena dampak dari Covid-19. Kabupaten Tanah Datar pada awalnya merupakan zona hijau namun ditemukan satu kasus positif COVID-19 pertama kalinya pada 25 Maret 2020 dan dinyatakan sembuh pada 6 April 2020.

Belum cukup satu bulan *new normal*, Kabupaten Tanah Datar diguncang kembali dengan ditemukan tiga kasus positif Covid-19 pada Kamis, 2 Juli 2020 (sumbar.kabardaerah.com). Namun akhirnya, mereka dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab oleh tim kedokteran Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya tidak ada lagi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi Kabupaten Tanah Datar masih berstatus zona kuning. Selama sebulan kedepan Tanah Datar akan terus di pantau dan diobservasi oleh pemerintah provinsi ada atau tidaknya penambahan kasus corona. Angka nol positif tidak berlangsung lama. Pada 9 Agustus 2020 ditemukan kembali 8 kasus positif Covid-19 yang dialami oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Lima Kaum 1. Hingga Rabu, 19 Agustus 2020 kasus positif di Kabupaten Tanah Datar terus bertambah dengan total 66 kasus terkonfirmasi Covid-19. Dengan rincian yaitu sebanyak 13 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 50 orang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit rujukan serta isolasi mandiri. (topsatu.com, 2020). Selanjutnya, dapat dilihat dari grafik pantauan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar:



**Gambar 1.1** Grafik Pantauan Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar

Source: *Covid-19.tanahdatar.go.id*.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya melalui tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah. Tidak hanya itu, mempertimbangkan himbauan dan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19 ini, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menerbitkan Instruksi Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dan Instruksi Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warung Internet (Warnet).

Kasatpol PP dan Damkar Yusnen melalui percakapan telepon menjelaskan Instruksi Bupati nomor 443/91/Gugus Tugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 memuat empat (4) point instruksi kepada masyarakat Tanah Datar (dalam Lintas SKPD, 2020), yakni:

Pertama, masyarakat dilarang bepergian keluar rumah (malam hari) dimulai pada pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok, berobat atau hal-hal yang sangat penting lainnya dengan ketentuan memakai masker. Kedua, Unsur Pemerintah Kecamatan (Forkopinca), nagari dan jorong

agar memantau dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini. Ketiga, bagi masyarakat yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh pihak yang berwenang Satpol PP bersama TNI dan POLRI. Keempat, Instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Sementara itu dalam Instruksi Bupati nomor 443/22/Gugus Tugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet juga memuat empat (4) Instruksi kepada Pengusaha/Pengelola Warung Internet (dalam Lintas SKPD, 2020), yakni:

Pertama, pengusaha/pengelola Warung Internet dilarang sementara waktu melaksanakan aktifitas dan Operasional Penyediaan Jasa Internet sampai berakhirnya penanganan pencegahan virus Corona (Covid-19). Kedua, unsur Pemerintah Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Tanah Datar untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini di wilayah kerja masing-masing. Ketiga, bagi pengusaha/pengelola Warung internet yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh Satpol PP bersama TNI dan POLRI. Keempat, instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar menyadari kapabilitasnya masih belum maksimal dan minim serta terdapat beberapa kelemahan. Salah satu masalahnya adalah sumber daya manusia yaitu keterbatasan personil, agar bisa berjalan dengan baik maka butuh dukungan seluruh elemen masyarakat mulai dari jorong, nagari, camat, forkompinca dan tokoh masyarakat, ulama, bundo kandung, guru, pelaku dan lainnya. Ini butuh kesadaran bersama menjaga diri, keluarga dan lingkungan dari wabah Covid-19. Masalah lainnya, sumber daya teknis yaitu minimnya fasilitas kesehatan untuk menampung pasien positif *corona*. APBD digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Untuk bagian kelembagaan tidak terlalu begitu dipermasalahkan, karena setiap lembaga/instansi berperan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Bencana non alam COVID-19 ini belum bisa dituntaskan dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Terlebih penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar mulai melebar yang membuat pemerintah daerah kewalahan dan masyarakat menjadi khawatir akan pandemi ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi bencana tersebut perlu adanya kapabilitas dari pemerintah itu sendiri. Bencana non-alam COVID-19 cenderung semakin meningkat. Selanjutnya, perkembangan COVID-19 yang membuat masyarakat takut dan khawatir akan keselamatan dan keamanan diri serta keluarganya.

Percepatan penanganan COVID-19 di daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai *leading sector* kebencanaan di daerahnya. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah membuat Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan juga sumber daya teknis. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam hal ini adalah kapabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Guna Mendukung Keamanan Nasional”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease 2019* guna mendukung keamanan nasional dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease 2019* guna mendukung Keamanan Nasional?

- b. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 guna mendukung Keamanan Nasional?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 guna mendukung Keamanan Nasional.
- b. Menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 guna mendukung Keamanan Nasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian terbagi atas dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan keilmuan pertahanan, keamanan nasional dan manajemen bencana dalam penanganan pandemi/wabah khususnya *coronavirus disease* 2019.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis pada praktik pertahanan dalam penanganan pandemi/wabah khususnya *coronavirus disease* 2019 dan berguna bagi institusi terkait dalam mengambil dan atau membuat kebijakan tentang kebencanaan khususnya bencana non alam *coronavirus disease* 2019.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori sangatlah penting bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Peneliti menggunakan teori sebagai panduan ataupun bahan awal sebelum terjun ke lapangan.

##### **2.1.1 Teori Keamanan Nasional**

Perkembangan lingkungan strategis negara tidak terlepas dari konsep keamanan nasional yang dimaknai sebagai suatu kondisi atau keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam. Aktivitas tersebut merupakan salah satu bentuk fungsi keamanan untuk memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik dan masyarakat, serta perlindungan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman baik dari faktor internal maupun faktor eksternal (Darmono, 2010:27-28).

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan, sehingga keamanan nasional tidak terlepas dari doktrin pertahanan negara berupa ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk menghadapi segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara (Susetyo, 2008:5).

Pelibatan dan pengerahan TNI dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan tugas pokok TNI untuk melaksanakan

operasi militer selain perang, khususnya mengenai operasi militer untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat.

Kementerian Pertahanan melalui Strategi Pertahanan Negara (2014:49) mengemukakan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Keamanan nasional berkaitan dengan *human security* yang meliputi tiga pilar, yaitu: (1) *freedom from want*, terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan; (2) *freedom from hazard impacts*, terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana; dan (3) *freedom from fear*, terkait dengan upaya pengurangan risiko konflik atau kejahatan (Brauch, 2015:6). Lingkungan strategis berkembang sangat dinamis, penuh ketidakpastian dan kompleks, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengetahui potensi dan hakikat ancaman serta tantangan terhadap kepentingan nasionalnya (Buku Putih Pertahanan, 2015). Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Berdasarkan pada uraian dari para ahli di atas mengenai keamanan nasional, maka yang dimaksud dengan keamanan nasional pada penelitian ini adalah suatu konsep yang digunakan dalam penyelenggaraan strategi nasional guna melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang dikatakan sebagai keamanan insani (*human security*) (Darmono, 2010). Selanjutnya keamanan nasional dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, serta masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara khusus dalam upaya penanggulangan bencana pandemi COVID-19.

### **2.1.2 Teori Manajemen Bencana**

Manajemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu untuk mempermudah pencapaian tujuan. G.R. Terry (2006) dalam bukunya "*Principles of*

*Management*” merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat menjadi POAC, yakni sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Batasan lain tentang perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua sumber daya manusia (SDM) yang ada harus optimal untuk mencapai tujuan. Penggerakan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia (SDM). Inti dari *actuating* adalah menggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar yang ditentukan. Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal seperti rencana (*planning*), perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam bidang penanggulangan bencana, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar dalam penanganan bencana, yang didalamnya menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Sedangkan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pemahaman dari bencana juga dinyatakan oleh UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction* (2009), bahwa bencana didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang

melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. Terdapat dua jenis utama bencana, yaitu: bencana alam dan bencana teknologi (UN/ISDR, 2002). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa "*Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi*".

Bencana memungkinkan terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak yang disebut sebagai ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki oleh masyarakat. Bila terjadi ancaman atau *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan yang dalam hal ini dikatakan memiliki kapasitas (*capacity*), maka masyarakat tersebut akan dapat menghadapi atau mengatasi peristiwa yang mengganggu dengan kemampuannya sendiri. Sementara, bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.

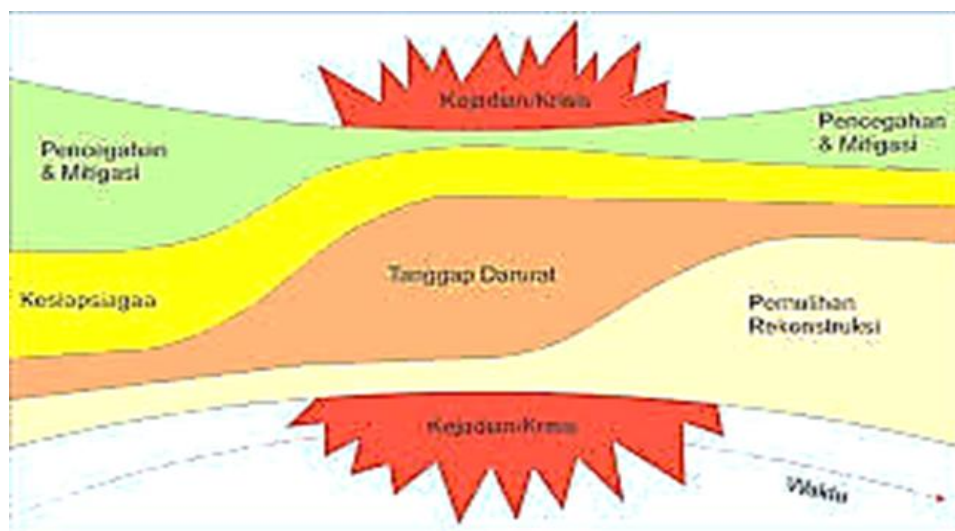
Menurut Nurjanah, dkk (2011) dalam bukunya tentang Manajemen Bencana, penyebab terjadinya bencana ada 3 (tiga) faktor, yaitu:

- a. Faktor alam (*natural disaster*) terjadi karena fenomena alam dan tanpa adanya campur tangan manusia.
- b. Faktor non alam (*non natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan juga dari perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial atau manusia (*man made disaster*) yang terjadi murni karena perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, terorisme dan sebagainya.

Berdasarkan teori mengenai bencana seperti yang tertera di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa bencana pandemi digolongkan menjadi bencana non alam yaitu merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh adanya persebaran wabah penyakit. Wabah penyakit dapat tersebar dikarenakan oleh faktor alam maupun faktor non alam.

Wabah penyakit yang dimaksud dalam penelitian ini tersebar melalui faktor alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana merupakan suatu kesatuan siklus yang dimulai dengan tahap pra bencana atau sebelum terjadinya bencana, berlanjut ketika terjadinya bencana atau tahap tanggap darurat kemudian setelah terjadinya bencana atau tahap pasca bencana (Syamsul Maarif, 2019).



**Gambar 2.1** Siklus Manajemen Bencana

Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengurangi, atau mencegah kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya bencana.
- b. Menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap para korban bencana.
- c. Mencapai pemulihan yang cepat dan efektif.

Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Secara garis besar terdapat 4 (empat) fase manajemen bencana, yaitu:

- a. Fase Mitigasi, sebagai fase dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; serta pembelajaran publik atau edukasi.
- b. Fase Kesiapsiagaan, sebagai fase untuk merencanakan bagaimana upaya menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, dan mengadakan sistem peringatan.
- c. Fase Respon, sebagai fase dalam upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh bencana saat terjadi. Contoh: pencarian dan pertolongan bagi para korban terdampak; melakukan kaji cepat dan tindakan darurat lainnya.
- d. Fase Pemulihan, sebagai fase dalam mengembalikan masyarakat ke kondisi normalnya. Contoh: perumahan sementara (*huntara*), bantuan keuangan serta perawatan kesehatan.

Keempat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut diatas. Fase-fase sering saling overlap dan lama berlangsungnya setiap fase bergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Dengan demikian, kaitannya dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, perlu dipahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.

Dari uraian dari para ahli di atas mengenai bencana, maka yang dimaksud dengan bencana pada penelitian ini adalah bencana non alam yaitu pandemi/wabah yang terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat hingga menyebabkan kerugian secara materi, hingga terjadinya gangguan psikologis juga perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat dan lingkungannya. Bencana non alam ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Adapun manajemen bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanganan bencana non alam berupa pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

### **2.1.3 Teori Kapabilitas**

Kapabilitas kerap kali menjadi istilah yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan akan arti pemaknaan ini menjadi penting tatkala dihubungkan dengan syarat interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya. Kapabilitas adalah ukuran dari kemampuan suatu entitas (departemen, organisasi, orang, sistem) untuk meraih tujuan-tujuannya, khususnya dalam hubungannya dengan misi secara keseluruhan. Kapabilitas adalah pengukuran yang digunakan setiap masyarakat untuk melihat kemampuan berbagai bidang sisi kehidupan, misalnya saja dalam organisasi, departemen, individu, ataupun sistem. Proses ini dilihat dari cara meraih visi (tujuan-tujuannya) dengan tingkat keberhasilannya.

Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas (Amir, 2011). Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. Hal tersebut mengartikan bahwa kemampuan merupakan

sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

Kapabilitas atau kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas dan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan (Moenir, 2001). Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas penting (Sampurno, 2011). Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Kapabilitas diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas. Istilah kecakapan digunakan untuk merujuk pada kemampuan kita menjalankan aktivitas fungsional, sementara kapabilitas dianggap bagaimana mengkombinasikan berbagai kecakapan. (Amir 2011).

Kapabilitas adalah kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kompleksitas kapabilitas mencerminkan adanya kebutuhan internal untuk menguasai tugas-tugas yang kompleks. Kapabilitas organisasi yang didefinisikan oleh *The Australian Public Service Commission* (2014), yakni:

*Organizational capability can be defined as: "The sum of the expertise of people and the capacity of the organization to apply this expertise". Expertise is the combined of staff and comprises organizational knowledge, skills and human capital. Capacity is how the organization applies its expertise. Capability captures an organisation's potential to achieve outcomes, the effectiveness with*

*which outcomes are achieved and the quality of outputs and outcomes.*

Kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian/kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki SDM nya, sehingga kapabilitas organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut *system* dan *process*. Kusumasari (2014) menghubungkan kapabilitas pemerintah dan faktor penting didalam pelaksanaan, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan dan kepemimpinan. Jadi, kapabilitas yaitu kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (*skill*) namun lebih dari itu yaitu lebih paham secara mendetail sehingga benar-benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Selanjutnya menurut Meiwanda, kaitan antara antara kapabilitas pemerintah dan faktor-faktor penting dalam manajemen bencana (2016) adalah sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintahan.

b. Sumber daya manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas.

c. Implementasi kebijakan

Tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan. Menjalinkan hubungan dengan institusi lainnya serta memobilisasi sumber daya.

d. Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktifitas dalam manajemen bencana.

e. Kepemimpinan

Memiliki kapasitas kepemimpinan yang dapat membaaur keputusan yang cepat dan tepat.

Menurut Kusumasari lebih spesifik lagi bahwa sumber daya dan faktor penting yang harus dilihat dalam menilai atau mengukur kapabilitas organisasi pemerintahan di cakupan daerah dalam penanggulangan bencana yang harus dimiliki adalah kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya teknis (2014). Berikut penjelasannya:

- a. Pertama, kelembagaan. Pengaturan kelembagaan yang efektif haruslah memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.
- b. Kedua, sumber daya manusia. Dalam tugas penanggulangan bencana memerlukan kerja sama sumber daya manusia yang didasarkan pada masalah dan upaya teknis terkait program masing-masing unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemulihan akibat bencana diperlukan keterpaduan beberapa program dan sektor terkait yang dapat dicapai melalui pertemuan berkala secara intensif.
- c. Ketiga, keuangan. Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang mana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Keempat, sumber daya teknis. Memiliki sistem logistik manajemen dan, informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat memang yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi teknologi dan jaringan komunikasi antara

organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

Berdasarkan penjelasan tentang teori kapabilitas di atas, maka kapabilitas dalam penelitian ini dimulai dari masalah kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mendeteksi (*detection*), mencegah (*preventive*), dan menangani (*response*) yang diukur atau ditinjau dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya teknis.

#### **2.1.4 Teori Pandemi/Wabah**

Menurut WHO (2007), "*pandemi ialah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan beberapa negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang*". Di Indonesia wabah penyakit yang pernah menyerang adalah penyakit cacar menyerang Ternate tahun 1558 dan di Ambon tahun 1564 (Widjajo Nitisastro, 1970).

Istilah pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai contoh wabah virus Zika yang dimulai di Brasil pada 2014 dan menyebar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016 (Serafica Gischa, 2020). Pandemi biasa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global. Wabah penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan

kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa (Kemenkes RI, 2006).

Setiap pandemi yang terjadi diberbagai belahan dunia dan periode waktu tertentu selalu menimbulkan korban jiwa yang besar. Sejarawan Universitas John Hopkins, Mary Fissell mengatakan bahwa sejarawan menggambarkan tiga gelombang wabah besar yaitu Wabah Justinian, pada abad keenam; epidemi abad pertengahan, pada abad ke-14; dan pandemi yang melanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Oleh karena itu kita harus ekstra waspada dan tidak boleh menganggap remeh. Berikut beberapa virus dan penyakit yang penyebarannya mencapai tingkat dunia:

a. Virus ebola

Kendati sudah terdeteksi pada tahun 1976 di wilayah Kongo, virus ini baru tersebar secara masif di periode 2013-2016. Dalam penyebaran di periode terakhir itu, WHO menetapkan penyebaran virus ebola sebagai PHEIC. Itu sebabnya, beberapa penerbitan populer juga menyebut ebola sebagai pandemi.

b. Flu babi atau Swine Flu

Penyakit yang disebabkan oleh virus H1N1 ini merupakan yang terakhir yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Pertama kali terdeteksi di Meksiko pada 2009, virus H1N1 menyebar ke berbagai kawasan di Amerika Serikat dan negara lain, setahun kemudian. Flu babi mengakibatkan sekitar setengah juta korban jiwa di seluruh dunia.

c. Sindrom Pernafasan Akut (SARS)

Karena memiliki banyak kesamaan, penyakit ini kerap diperbandingkan dengan COVID-19. Salah satu kesamaan itu adalah nama virus yang menyebabkan SARS dan COVID-19, yaitu corona. Struktur dari kedua virus corona itu pun disebut-sebut sangat mirip. Sama seperti COVID-19, SARS pertama kali tercatat di China. Setelah terekam di 2003, SARS kemudian

menyebarkan ke sedikitnya 17 negara lainnya. Kendati menyebabkan korban jiwa hingga mendekati 800 nyawa di sekitar 18 negara, SARS tidak diklasifikasikan sebagai pandemi.

d. Flu Spanyol

Di luar ketiga virus di atas, sejarah dunia juga pernah mencatat penyebaran wabah penyakit yang sangat luas. Salah satunya flu Spanyol. Penyakit ini mencengkeram dunia selama 1918 sampai 1920. Pergerakan tentara yang terjadi di masa Perang Dunia Pertama turut memperparah penyebaran virus penyakit ini. Sebanyak 500 juta orang disebut-sebut terinfeksi virus flu Spanyol. Sementara korban jiwa akibat penyakit ini berdasarkan wikipedia setidaknya mencapai 50-100 juta jiwa.

e. Kolera

Wabah kolera terjadi paling tidak 10 kali selama abad ke-19 hingga abad ke-20. Dan, total jumlah korban jiwa akibat wabah kolera diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa. Di Indonesia, kolera terakhir kali menjadi wabah di sekitar tahun 1960-an hingga pertengahan dekade 1970-an.

Jika ditinjau dari keamanan nasional wabah covid 19 merupakan dinamika yang sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan

ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Berdasarkan uraian dari para ahli di atas mengenai pandemi yang menjadi bencana, maka yang dimaksud dengan pandemi yang menjadi bencana pada penelitian ini adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam keamanan nasional. Penyebaran COVID-19 sangat masif. WHO menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dikarenakan COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Pandemi COVID-19 menyebar secara *droplet*. *Droplet* ditimbulkan dari orang (sumber) yang terinfeksi terutama selama terjadinya batuk, bersin, dan berbicara. Penularan terjadi bila droplet yang mengandung mikroorganisme ini tersembur dalam jarak dekat (biasanya <1 meter) melalui udara dan terdeposit di mukosa mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain. Karena droplet tidak terus melayang di udara, penanganan udara dan ventilasi khusus tidak diperlukan untuk mencegah penularan melalui droplet (WHO, 2007).

## 2.2 Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan COVID-19. Terkait dengan penelitian yang hampir sama dengan peneliti, yang mana sudah banyak dilakukan, diantaranya oleh:

- a) Muhammad Helyus Kagami yang memfokuskan penelitiannya tentang Kapabilitas BPBD Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana.
- b) Rizki Alta Edison yang memfokuskan penelitiannya tentang Penguatan Kapabilitas BPBD Provinsi Riau dalam Penanggulangan Kabut Asap Tahun 2015.
- c) Geovani Meiwanda yang memfokuskan penelitiannya tentang Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- d) Yanfri Satria Sanjaya yang memfokuskan penelitiannya tentang Kapabilitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) YONZIPUR 10/2 KOSTRAD Terhadap Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang Di Bima NTB.
- e) Hani Syarifah yang memfokuskan penelitiannya tentang Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENELITI	TAHUN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kapabilitas BPBD Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Bencana	Muhammad Helyus Kagami	2014	Dengan memiliki kapabilitas BPBD Kota Bandar Lampung dapat meminimalisir resiko bencana di daerahnya dengan melakukan mitigasi dan simulasi bencana	Variabel Kapabilitas	Variabel penanggulangan bencana dan Lokasi penelitian
2	Penguatan Kapabilitas BPBD Provinsi Riau dalam Penanggulangan Kabut Asap Tahun 2015	Rizki Alta Edison	2015	Dengan memberikan penguatan dan atau reinforcement terhadap kapabilitas BPBD dapat meminimalisir resiko bencana kabut asap di Riau	Variabel Kapabilitas	Lokasi penelitian dan variabel penanggulangan bencana kabut asap
3	Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Geovani Meiwanda	2016	Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan dengan efektif.	Variabel kapabilitas pemerintah daerah	Lokasi penelitian dan variabel Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

4	Kapabilitas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) YONZIPUR 10/2 KOSTRAD Terhadap Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang Di Bima NTB	Yanfri Satria Sanjaya	2018	Kapabilitas PRCPB YONZIPUR 10/2 KOSTRAD terhadap penanganan Bencana Alam Banjir Bandang Di Bima NTB belum optimal karena masih ada kelemahan dari segi pelaksanaan tugas karena tidak adanya Protap dan SOP yang mengatur secara rinci	Variabel kapabilitas	Variabel PRCPB dan bencana alam serta lokasi penelitian
5	Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Hani Syarifah	2020	Kapabilitas BPBD Kota Balikpapan tergolong baik karena adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana Karhutla.	Variabel kapabilitas	Lokasi penelitian dan variabel bencana alam Karhutla

Sumber: Tesis 2015. Jurnal 2014, 2016, 2018, 2020

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka berfikir bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis (*theoretical model*). Adapun penelitian ini berfokus pada kapabilitas pemerintah kabupaten tanah datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu:

INPUT

PROSES

OUTPUT

**Fenomena**

- Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar sebagai ancaman faktual bencana non alam.
- Peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar
- Dinamika ancaman meliputi ancaman nirmiliter seperti ancaman keselamatan, ancaman bagi perekonomian daerah, ancaman kesehatan.
- Kelemahan dan kekurangan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.
- Kurangnya edukasi dan sosialisasi pada masyarakat serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

**Teori**

- Keamanan Nasional
- Manajemen Bencana
- Kapabilitas
- Pandemi/Wabah

**Research Question**

Bagaimana kapabilitas dan upaya pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam penanganan Covid-19 guna mendukung keamanan nasional ditinjau dari:

1. Kelembagaan
2. Sumber Daya Manusia
3. Keuangan
4. Sumber Daya Teknis

**Output**

Gambaran kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 guna mendukung keamanan nasional

**Outcome**

Mendukung keamanan nasional melalui kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19.

**Masalah**

1. Pandemi Covid-19 mengancam keamanan nasional
2. Pandemi Covid-19 mengancam Kabupaten Tanah Datar
3. Status Wilayah Zona Orange (tingkat risiko sedang) di Kabupaten Tanah Datar
4. Jumlah Kasus Positif Covid-19 meningkat di Kabupaten Tanah Datar
5. Kelemahan dan kekurangan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

**Metode**

Kualitatif (Deskriptif)

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Menurut Mukhtar, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah “sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu”. (2013:10).

Data dari metode ini dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan partisipasi. Menurut Sukmadinata bahwa “penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskriptifkan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. (2011:73).

Penelitian ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Metode ini sangat tepat dipakai untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau kejadian di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan kapabilitas pemerintah kabupaten tanah datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 guna mendukung keamanan nasional.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka menyukseskan penelitian ini, maka tempat dan waktu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena topik dari penelitian ini ialah mengenai penanganan *coronavirus disease 2019*, yang di dalamnya terkait dengan lembaga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga karena Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu zona oranye di Provinsi Sumatera Barat.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 – Januari 2021 di Kabupaten Tanah Datar. Berikut peneliti sajikan tabel rencana jadwal penelitian:

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan										
		Mar 20	Apr 20	Mei 20	Jun 20	Jul 20	Agus 20	Sep 20	Okto 20	Nov 20	Des 20	Jan 21
1	Studi Literatur											
2	Penyusunan Pra Proposal											
3	Seminar Pra Proposal											
4	Penyusunan Proposal											
5	Pengesahan Proposal											
6	Seminar Proposal											
7	Pengumpulan Data											
8	Pengolahan Data											
9	Analisis Data											
10	Seminar Hasil											
11	Penyusunan Tesis											
12	Sidang Tesis											
13	Revisi Tesis											
14	Publikasi Tesis											

Sumber: Peneliti

### 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya (atribut) akan diteliti. Dengan kata lain subyek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Jika subyek penelitian adalah orang, maka peneliti menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai informan (narasumber) dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data/informasi.

Obyek penelitian adalah permasalahan atau isu yang diteliti dan menjadi titik perhatian suatu penelitian. Obyek penelitian juga diartikan sifat keadaan (atribut) dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga) serta bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya (orang), bisa pula berupa proses, fenomena, sistem dan sebagainya (lembaga).

#### 3.3.1 Subyek Penelitian

Menurut Nuryaman dan Christina menyebutkan bahwa "Subyek penelitian adalah unit analisis atau unit observasi yang akan diteliti." (2015). Artinya, subyek penelitian merupakan orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Merupakan pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- c. Merupakan pelaku dari dunia usaha di Kabupaten Tanah Datar;
- d. Merupakan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar;
- e. Aktif dalam penanganan *coronavirus disease* 2019.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* yaitu ditentukan selaras dengan tujuan studi. Penelitian ini mengelompokkan lembaga/instansi berdasarkan fungsi dan peran. Peran dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut.

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- b. BPBD Kabupaten Tanah Datar (Jabatan: Kalaksa BPBD Kabupaten Tanah Datar);
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar (Jabatan: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar);
- d. Objek Wisata Vital Istan Basa Pagaruyung;
- e. Badan Usaha Dangau Sawah Tengah Chanta;

Dari persyaratan mengenai informan, kemudian peneliti mengklasifikasikan informan dalam dua kategori informan (Sugiyono, 2005), yaitu:

- a. Informan kunci, yaitu informan yang 'membukakan pintu' untuk diarahkan kepada informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak dari instansi terkait yang terlibat langsung dalam penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Tanah Datar yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, BPBD Kabupaten Tanah Datar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Informan pendukung, yakni informan yang mengetahui dan terlibat langsung, namun tidak secara penuh terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan tidak langsung ini untuk mengklarifikasi sumber-sumber lainnya. Informan pendukung ini adalah masyarakat yang terkait dalam penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Objek Wisata Vital Istan Basa Pagaruyung dan Badan Usaha Dangau Sawah Tengah Chanta.

### 3.3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti mengenai kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan COVID-19 guna mendukung keamanan nasional. Adapun penelitian ini meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya teknis dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada proses wawancara, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Artinya, dokumen mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi dalam mengumpulkan data di lapangan atau lokasi penelitian. Terakhir, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi guna melengkapi data hasil wawancara dan dokumentasi.

Berikut penjelasan terkait alat pengumpul data penelitian tentang kapabilitas pemerintah daerah dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

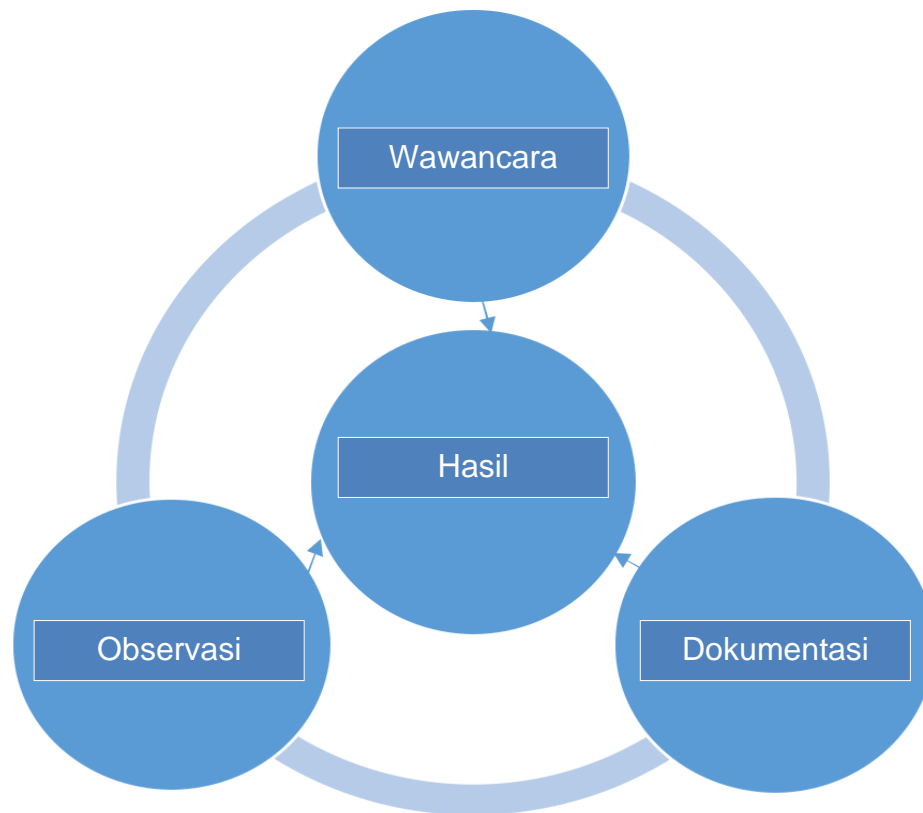
- a. Wawancara yaitu metode riset dengan melakukan kegiatan wawancara tatap muka. Wawancara merupakan instrumen penelitian yang sangat fleksibel karena tidak membutuhkan banyak ruang dan waktunya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mendapat informasi verbal secara langsung dan detail dari informan yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

- b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2007), suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan dipakai adalah berupa laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait.
- c. Observasi, yaitu ruang peneliti untuk dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku objek penelitian. Observasi juga merupakan salah satu upaya peneliti untuk dapat memahami lebih dalam mengenai studi kasus yang sedang diteliti.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi belum dinilai sah dan belum dapat dilanjutkan penelitiannya jika belum dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Peneliti perlu melakukan pengujian keabsahan dan keterandalan data dengan melakukan validasi. Validasi dalam penelitian kualitatif adalah upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2013).

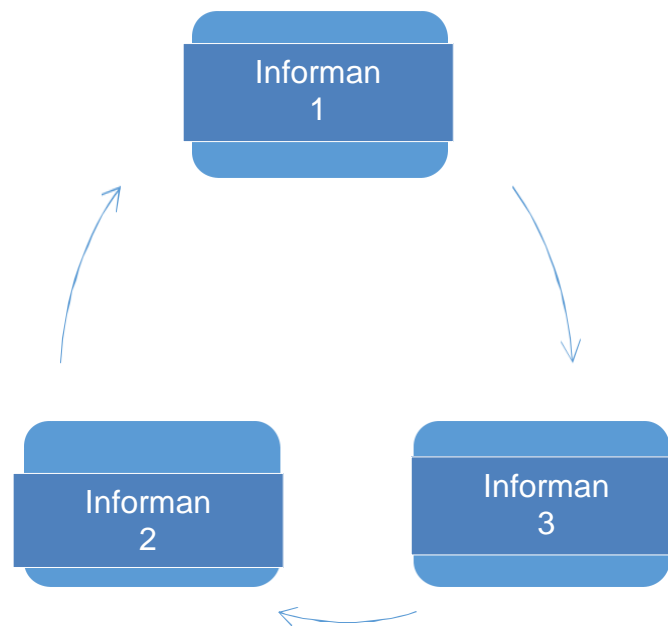
Keabsahan data juga dapat dilakukan dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan empat macam teknik yang berbeda diantaranya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber (Moleong, 2010).



**Gambar 3.1** Skema Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam proses triangulasi peneliti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan menempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Membandingkan data hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi.
- c. Membandingkan data hasil observasi dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



**Gambar 3.2** Skema Sumber Informan Wawancara

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dalam teknik pengumpulan data, kemudiandianalisis, yang biasanya disebut dengan analisis data. Menurut Miles dan Huberman (2014), langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

a. Kondensasi Data (*Condensation*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikondensasi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan

b. Penyajian Data (*Display*)

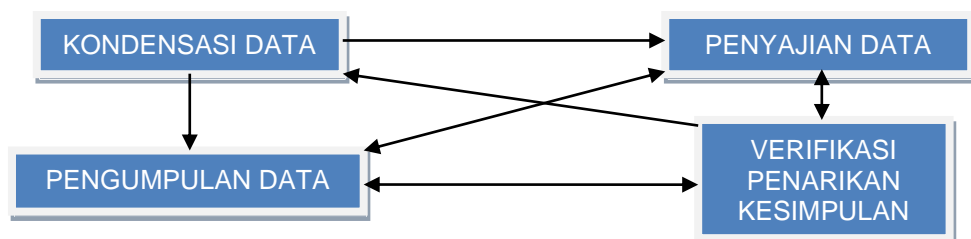
Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi, dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan

Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan, dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah.

Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, dokumentasi, dan observasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa langkah yang dapat dilakukan dalam mengolah data yang sudah didapatkan dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu kondensasi data (memilah data pokok), mendisplay data (penyajian data), dan terakhir memverifikasi dan menyimpulkan data seperti pada gambar berikut ini:



**Gambar 3.3** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Hubberman, dan Saldana (2014)

Adapun prosedur yang dijadikan dalam proses analisis data di atas dapat berisi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen kemudian dibuat catatan lapangan secara lengkap. Catatan lapangan ini terdiri atas deskripsi dan refleksi.
- b. Berdasarkan catatan lapangan, selanjutnya dibuat kondensasi data berupa memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data.
- c. Dari kondensasi data kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan suntingan peneliti supaya maknanya lebih jelas dipahami. Sajian data ini, dilengkapi dengan faktor pendukung, antara lain metode, skema, bagan, tabel, dan sebagainya.
- d. Berdasarkan sajian data tersebut, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru dan pemahaman baru, sehingga akan didapat suatu kesimpulan yang mantap dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demikian seterusnya aktivitas penelitian ini berlangsung, yaitu terjadi, interaksi yang terus menerus antara ketiga komponen analisisnya bersamaan dengan pengumpulan data baru yang dirasakan bisa menghasilkan data yang lengkap sehingga dapat dirumuskan kesimpulan akhir.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terbesar dan tertua di Provinsi Sumatera Barat dengan begitu Kabupaten Tanah Datar disebut sebagai *Luhak Nan Tuo*. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi bencana alam seperti longsor, banjir bandang dan juga gempa bumi. Disamping itu, akhir-akhir ini Kabupaten Tanah Datar juga memiliki ancaman bencana non alam yaitu *coronavirus disease*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa daerah ini merupakan zona orange atau zona dengan tingkat kasus covid sedang. Artinya, masyarakat Tanah Datar terancam keselamatannya oleh *coronavirus disease* ini.

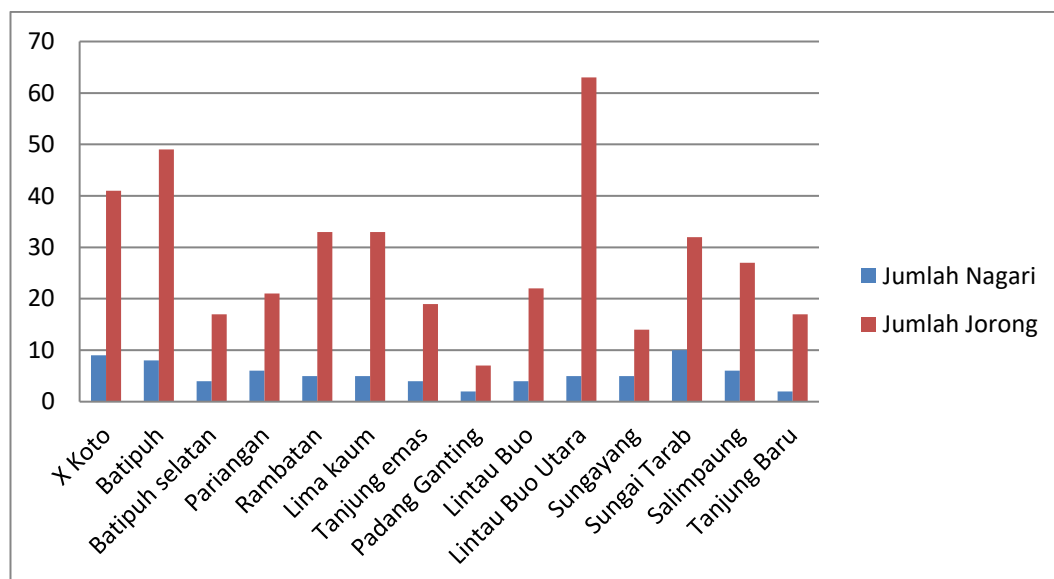


**Gambar 4.1** Peta Sebaran Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Gambar 4.1 maka dapat dilihat bahwa adanya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada setiap kecamatan. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar menyadari bahwa perlu adanya tindakan dan upaya dalam rangka memutus mata rantai Covid-19 di wilayah kerjanya.

Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai *Luhak Nan Tuomerupakan* salah satu wilayah yang terletak di tengah-tengah Propinsi Sumatera Barat dengan ibukota Batusangkar. Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi  $00^{\circ} 17''$  LS -  $00^{\circ} 39''$  LS dan  $100^{\circ} 19'$  BT -  $100^{\circ} 51'$  BT, dengan luas wilayah 1.336 Km<sup>2</sup> atau 133.600 Ha dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong.

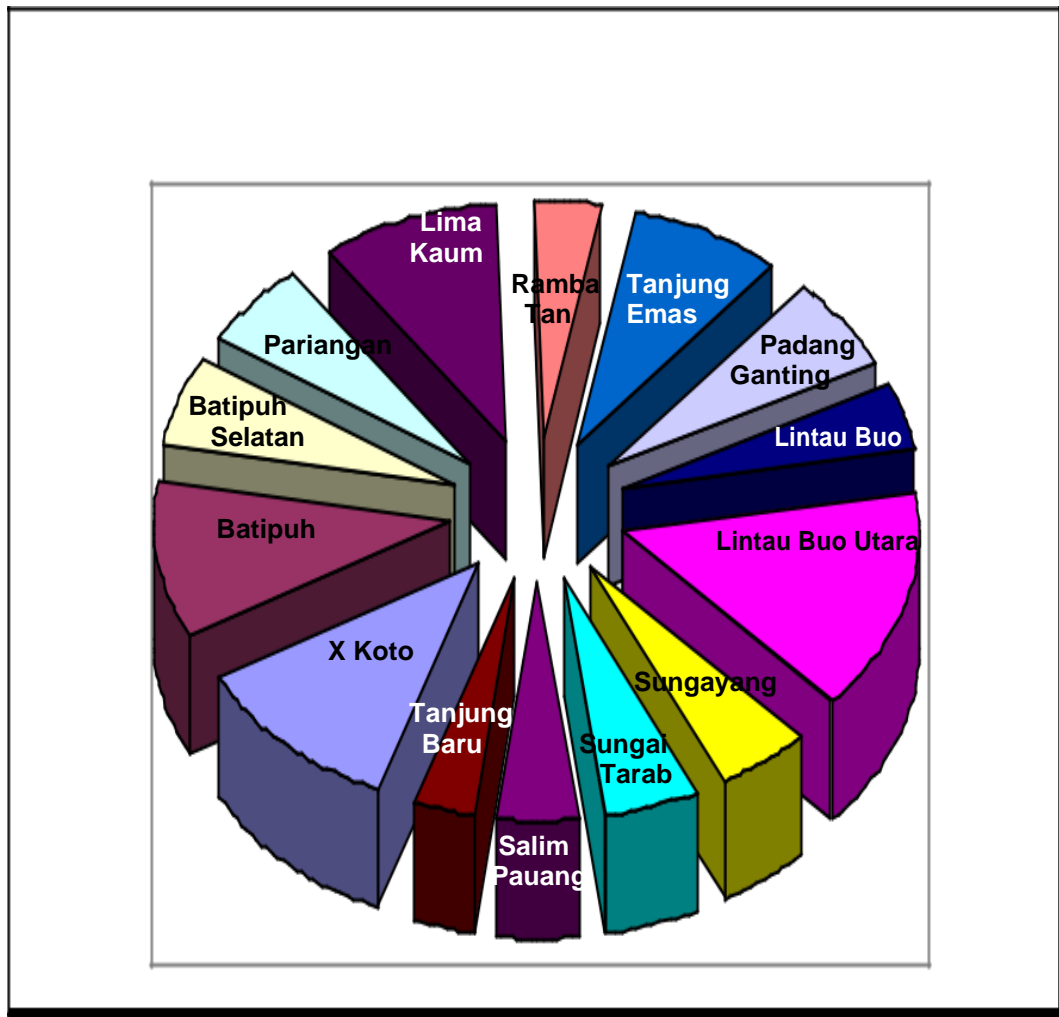


**Gambar 4.2** Grafik Jumlah Nagari dan Jorong Per Kecamatan Di Kabupaten Tanah Datar

Sumber Data: Buku Putih Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan gambar 4.2, berdasarkan 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar maka dapat dilihat bahwa Kecamatan Sungai Tarab memiliki jumlah nagari terbanyak yaitu 10 nagari, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Padang Ganting dan Tanjung Baru sebanyak 2 nagari. Dilihat dari jumlah

orong yang ada, Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki jumlah orong terbanyak yaitu 63 orong, sedangkan Kecamatan Padang Gantiang memiliki jumlah orong terkecil yaitu 7 orong.



**Gambar 4.3** Diagram Luas Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Buku Putih Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas jelas terlihat bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan Tanjung Baru.



permukaan laut. Sedangkan 7 kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi. Bila dilihat dari luas wilayah menurut wilayah Kecamatan, yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas sekitar 50,00 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas sekitar 203,26 Km<sup>2</sup>, selanjutnya diikuti oleh Kecamatan X Koto yang luas wilayahnya sekitar 152,02 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah dengan kondisi topografi bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi ±200 - 1000 m di atas permukaan laut. Untuk lebih jelas mengenai topografi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

Ketinggian Kabupaten Tanah Datar Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (M)
1	X Koto	700 – 1000
2	Batipuh	500 – 850
3	Batipuh Selatan	500 – 850
4	Pariangan	500 – 800
5	Rambatan	600 – 700
6	Lima Kaum	450 – 550
7	Tanjung Emas	450 – 550
8	Padang Ganting	450 – 550
9	Lintau Buo	200 – 750
10	Lintau Buo Utara	200 – 750
11	Sungayang	400 – 750
12	Sungai Tarab	450 – 550
13	Salimpaung	750 – 1000
14	Tanjung Baru	750 – 1000

Sumber: Buku Putih Kabupaten Tanah Datar

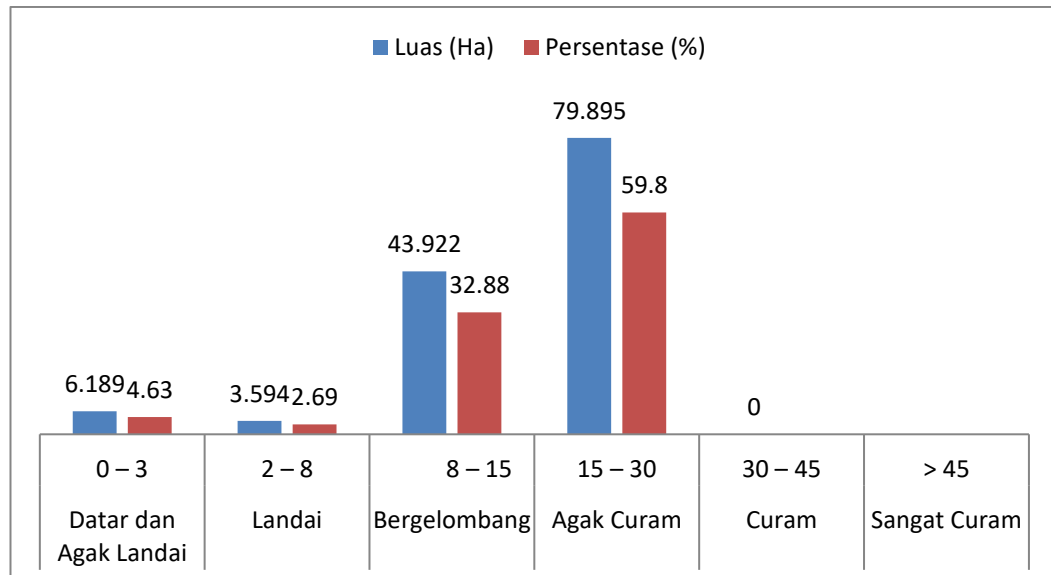
Kabupaten Tanah Datar berada di suatu cekungan gunung dan perbukitan yang melingkar dengan ketinggian berkisar antara 100 – 2.891 meter dari permukaan laut. Bentuk bentang alam yang sekarang ini merupakan pencerminan dari proses alam yang bekerja di daerah Tanah

Datar, dimana proses pembentukan bentang alam sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis batuan, struktur geologi serta intensitas proses (erosi).

Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu:

- a. Daerah dengan kemiringan lahan 0 – 3 % (Datar) sebagian besar tersebar di Kecamatan Tanjung Emas, Rambatan, Lintau Buo, Tanjung Baru dan Kecamatan Padang Ganting.
- b. Daerah dengan kemiringan lahan 3 – 8 % (Agak Landai) sebagian besar tersebar di Kecamatan Lima Kaum, Rambatan, Sungai Tarab, Salimpaung dan Kecamatan Sungayang.
- c. Daerah dengan kemiringan lahan 8 – 15 % (Bergelombang), sebagian besar tersebar di Kecamatan Lintau Buo Utara, Pariangan, Sungai Tarab, X Koto dan Kecamatan Batipuh.
- d. Daerah dengan kemiringan lahan 15 – 25 % (Agak Curam), penyebarannya hampir di seluruh kecamatan sama, kecuali bagian tengah wilayah Kabupaten Tanah Datar meliputi; sebelah utara Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Rambatan, sebelah selatan Kecamatan Lintau Buo Utara, Sungayang, Pariangan dan Kecamatan Sungai Tarab. Lahan dengan kemiringan 15 -25 % ini merupakan wilayah paling luas dan dominan di Kabupaten Tanah Datar.
- e. Daerah dengan kemiringan lahan 25 – 45 % (Curam), sebagian besar tersebar di Kecamatan X Koto, Batipuh Selatan, Sungayang dan Tanjung Emas.
- f. Daerah dengan kemiringan lahan >45 % (Sangat Curam), sebagian besar tersebar di sebelah barat, utara dan bagian timur wilayah Tanah Datar. Komponen kelerengan diatas 45 % ini menjadikan kendala dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Tanah Datar karena kawasan dengan kelerengan sangat curam berpotensi terancam bahaya longsor dan erosi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kemiringan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

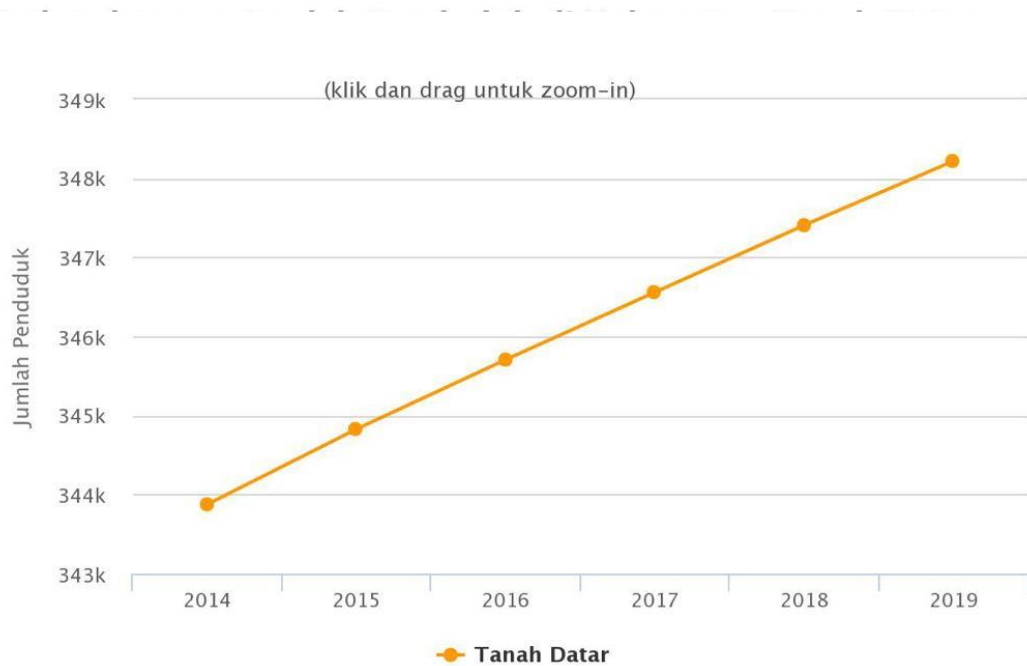


**Gambar 4.5** Grafik Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan Di Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Buku Putih Kabupaten Tanah Datar

Pada 25 Maret 2020 Kabupaten Tanah Datar memiliki ancaman akan bencana non alam yaitu *coronavirus disease 2019* atau Covid 19. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar menjadi zona *orange* dikarenakan perkembangan kasus Covid 19 tingkat sedang. Dibutuhkan upaya pemerintah daerah dalam rangka penanganan Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga populasi manusia di Kabupaten Tanah Datar meningkat dan ancaman akan kematian akibat Covid 19 juga meningkat. Berikut merupakan grafik perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar:



**Gambar 4.6** Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Tanah Datar

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas maka dapat dilihat bahwa adanya kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar pada setiap tahunnya. Artinya, tidak tertutup kemungkinan meningkatnya angka kematian di Kabupaten Tanah Datar. Terkhusus saat ini sudah ada 33 orang meninggal dikarenakan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar dari total 985 yang telah terkonfirmasi pandemi tersebut.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Bencana Non Alam *Coronavirus Disease* 2019 di Kabupaten Tanah Datar**

Virus Corona menjadi isu yang makin meresahkan masyarakat. Akibatnya, terjadi kepanikan masyarakat, karena khawatir Covid 19 ini makin menyebar. Penyakit virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular Covid 19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.

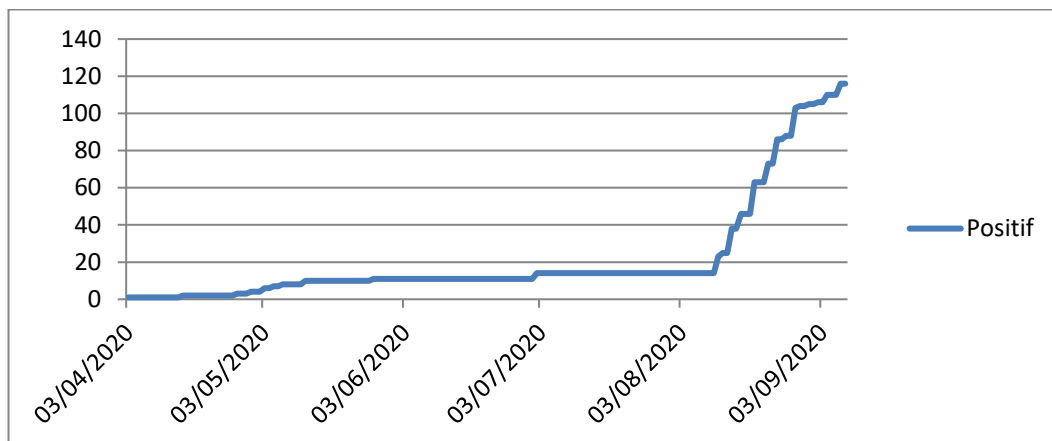
Virus yang menyebabkan Covid 19 terutama ditransmisikan melalui *droplet* (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. *Droplet* ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi Covid 19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda.

Ancaman *Coronavirus Disease* (Covid 19) telah melanda berbagai sektor di Pemerintahan Tanah Datar, tidak hanya penutupan objek wisata, pembatasan layanan publik, pembatasan pelaksanaan pesta pernikahan sampai pengunduran rencana Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak yang direncanakan 24 Juni 2020 yang lalu. Pengunduran pelaksanaan Pilwana serentak berdasarkan keputusan Kemendagri RI dan Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya berdasarkan Perbup Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2020, Pilwana serentak 21 dari 75 Nagari akan digelar 24 Juni mendatang, namun karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid 19 ini, maka kegiatan itu terpaksa ditunda dalam waktu yang belum ditentukan.

Kabupaten Tanah Datar pada awalnya merupakan zona hijau namun ditemukan satu kasus positif COVID-19 pertama kalinya pada 25 Maret 2020 dan dinyatakan sembuh pada 6 April 2020. Belum cukup satu bulan *new normal*, Kabupaten Tanah Datar diguncang kembali dengan ditemukan tiga kasus positif Covid-19 pada Kamis, 2 Juli 2020 ([sumbar.kabardaerah.com](http://sumbar.kabardaerah.com)). Namun akhirnya, mereka dinyatakan sembuh berdasarkan hasil swab oleh tim kedokteran Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya tidak ada lagi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi Kabupaten Tanah Datar masih berstatus zona kuning.

Selama sebulan kedepan Tanah Datar akan terus di pantau dan diobservasi oleh pemerintah provinsi ada atau tidaknya penambahan kasus

corona. Angka nol positif tidak berlangsung lama. Pada 9 Agustus 2020 ditemukan kembali 8 kasus positif Covid-19 yang dialami oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Lima Kaum 1. Hingga Rabu, 19 Agustus 2020 kasus positif di Kabupaten Tanah Datar terus bertambah dengan total 66 kasus terkonfirmasi Covid-19. Dengan rincian yaitu sebanyak 13 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 50 orang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit rujukan serta isolasi mandiri. (topsatu.com, 2020). Selanjutnya, dapat dilihat dari grafik pantauan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar:



**Gambar 4.7** Grafik Pantauan Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Gambar 4.7 terlihat bahwa kasus Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan, hingga dalam penanganannya sangat dibutuhkan kapabilitas pemerintah daerah yang mumpuni agar mampu menekan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Tanah Datar. Guna mencegah penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19), berbagai langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah. Tidak hanya itu, mempertimbangkan himbauan dan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19 ini, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi



## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap subjek atau informan yang telah dipilih dalam rangka menganalisis kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Peneliti akan menjabarkan hasil temuan penelitian dengan subjek atau informan yang telah dipilih yaitu sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Irwandi, S.Ip., M.Si berperan aktif pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda dan Perangkat Daerah lainnya dengan mendapatkan hasil kesepakatan strategis yaitu membentuk gugus tugas sesuai yang diamanatkan Keppres nomor 7/2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *coronavirus disease* (Covid-19).

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar juga bertanggung jawab pada operasional pelaksanaan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah

Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa secara kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar cukup baik. Sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki anggaran dan keuangan untuk percepatan penanganan Covid-19 yaitu sekitar 60 Milyar Rupiah, semua lembaga terlibat aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 dan sumber daya teknis seperti penyediaan rumah sakit untuk pasien Covid-19 maupun pasien yang diisolasi tersedia dengan baik.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar

Menurut Kepala Pelaksana Bapak Thamrin, S.T bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar telah berperan aktif pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas menggerakkan dan mengaktifkan kinerja dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, BPBD merupakan bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan memiliki tupoksinya sebagai penggerak operasional Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

BPBD Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan

percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut BPBD Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. BPBD Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa BPBD memiliki sumber daya atau personil yang cukup dalam percepatan penanganan Covid-19, terkait anggaran yang dipakai dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar diambil dari APBD dan APBN yaitu sekitar 60 Milyar Rupiah. Penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang perlu dirawat dengan penyakit bawaan dan atau mereka yang tanpa gejala. Terakhir, BPBD menyampaikan bahwa lembaganya berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dalam rangka preventif dan kuratif terhadap penyebaran Covid-19, BPBD Kabupaten Tanah Datar telah melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada setiap kantor dinas atau instansi lembaga Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan objek vital keramaian yang ada di Kabupaten Tanah Datar.



**Gambar 4.9** Penyemprotan Desinfektan oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar

Gambar 4.9 di atas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yaitu penyemprotan desinfektan di kantor instansi lembaga Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan objek vital keramaian di Kabupaten Tanah Datar.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu Ibu Ns. Roza Mardiah, S.Kep., M.Kep bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berperan aktif pada Satuan

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan merupakan bagian terpenting dan utama dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan memiliki tupoksinya sebagai *leading sector* pada Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa Tanah Datar hanya memiliki 1 dokter spesialis paru dan 3 dokter spesialis penyakit dalam percepatan penanganan Covid-19

Penyediaan rumah sakit dan tempat isolasi bagi pasien Covid-19 yang perlu dirawat dengan penyakit bawaan dan atau mereka yang tanpa gejala. Artinya, memiliki sumber daya teknis yang

cukup. Selanjutnya Dinas kesehatan menyampaikan bahwa lembaganya berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.



**Gambar 4.10** Penerimaan Bantuan Logistik APD Covid-19 Dari Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.10 di atas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar bersama Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar telah menerima bantuan logistik APD (Alat Pelindung Diri) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

d. Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung

Menurut Kepala Unit Pelaksana teknis Bapak Bapak Ridwan, S.Sos bahwa Istano Basa Pagaruyung sebagai salah satu objek wisata vital yang ada di Kabupaten Tanah Datar juga berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di wilayahnya. Artinya, Istano Basa Pagaruyung menerapkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung. Dalam hal ini, Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung menyatakan bahwa seluruh personil dan karyawan di dalamnya mewajibkan mereka untuk

menerapkan protokol kesehatan. Artinya, seluruh personil Kabupaten Tanah Datar menerapkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak dengan wisatawan yang berkunjung tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa semua lembaga yang tergabung dalam satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga. Artinya, kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar lembaga dan juga memaksimalkan peran relawan dan organisasi yang ada di masyarakat. Objek wisata Istano Basa Pagaruyung juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berupa cairan desinfektan dan alat penyemprot cairan desinfektan tersebut.

Menurut Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran wisatawan pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya wisatawan yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Kepala UPT objek wisata Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa mereka masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia dalam memaksimalkan kinerja di lingkungan objek wisata Istano Basa Pagaruyung.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan adanya kegiatan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan objek wisata ini. Kegiatan tersebut adalah penyemprotan desinfektan yang dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar.



**Gambar 4.11** Penyemprotan Desinfektan di Lingkungan Objek Wisata Vital Istano Basa Pagaruyung

Gambar 4.11 di atas merupakan kegiatan penyemprotan desinfektan di lingkungan objek wisata Istano Basa Pagaruyung yang dibantu oleh Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar.

e. Badan Usaha Dangau Sawah Tangah Chanta

Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah Chanta yaitu Bapak Parlin mengakui belum melakukan tindakan apa-apa ketika adanya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa sebagai selaku dunia usaha menunggu instruksi dan arahan serta kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah Chanta Kabupaten Tanah Datar hanya menunggu kebijakan terkait pencegahan dan penanganan terhadap Covid-19.

*Owner* cafe ini mengakui bahwa usaha ini mengikuti semua kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan. Artinya, dunia usaha ini menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah secara baik dengan adanya saling koordinasi dan komunikasi antar dirinya dengan karyawan dan juga memaksimalkan segenap fasilitas yang ada agar penikmat kuliner bisa makan dengan aman dan nyaman.

Menurut pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar, dalam upaya pengaplikasian kebijakan pemerintah di lokasi usahanya ternyata masih terdapat kendala yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pada pentingnya penerapan protokol kesehatan. Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar masih menemukan adanya masyarakat yang bandel dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini memicu perkembangan dan penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tangah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa mereka memiliki sumber daya atau personil yang cukup dalam percepatan penanganan Covid-19 di lokasi usahanya. *Owner* juga

mengeluarkan anggaran untuk menyediakan segala perlengkapan protokol kesehatan di lokasi usahanya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Penyediaan wastafel untuk cuci tangan di gerbang masuk, memisahkan pintu masuk dan pintu keluar, serta selalu melakukan pengecekan terhadap suhu tubuh pelanggan yang ingin makan di tempat. Artinya, pemilik usaha kuliner Dangau Sawah Tengah (DST) Cafe Chanta Kabupaten Tanah Datar memiliki sumber daya teknis yang cukup di lokasi usahanya.

Selanjutnya, hasil observasi di lapangan peneliti menemukan Badan Usaha Dangau Sawah Tengah Chanta berperan aktif dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar demi mewujudkan Kabupaten Tanah Datar bebas Covid-19 di tahun 2021. Hal ini terbukti dengan adanya penyemprotan desinfektan dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan cafe tersebut.



**Gambar 4.12** Penyemprotan Desinfektan dan Penerapan Protokol Kesehatan di Dangau Sawah Tengah Chanta

Gambar 4.12 merupakan kegiatan penerapan protokol kesehatan dan penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh Badan Usaha Danga Sawah Tengah Chanta dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Jadi, berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas maka hasil temuan penelitian tentang kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kelembagaan khusus dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanah Datar.
- 2) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki SDM yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki 1 dokter spesialis paru sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
- 3) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan dana sebesar 60 Milyar Rupiah untuk penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya.
- 4) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *face shield*, *hand sanitizer*, dan APD medis lainnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengeluarkan intruksi Bupati dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki 1 rumah sakit untuk isolasi pasien Covid-19.

#### **4.2.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019***

Peneliti telah melakukan penelitian ke lapangan dan ditemukan bahwa adanya penambahan kasus Covid-19 Kabupaten Tanah Datar sebanyak 12 orang dan sembuh nihil pada Kamis, 07 Januari 2021. Untuk data rekapan hingga hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 yaitu akumulasi kasus konfirmasi sebanyak 868 orang yang terdiri dari 4 orang dirawat di RSUD M.Djamil Padang, 1 orang dirawat di RS Rasidin, 3 orang dirawat di RSAM Bukittinggi, 3 orang dirawat di RS Ibnu Sina Padang Panjang, 3 orang dirawat RSUD Hanafiah Batusangkar, 2 orang dirawat di RS Ibnu Sina Bukittinggi, 3 orang isolasi di RSUD Padang Panjang dan 74 orang isolasi mandiri, 740 orang sudah sembuh dengan hasil 2x negatif, meninggal dunia 29 orang. Sementara Suspek 15 orang, 3 orang Probable dan 0 untuk pelaku perjalanan.

Guna mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, mulai dari penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah. Tidak hanya itu, mempertimbangkan himbauan dan aturan terbaru dari Pemerintah Pusat terhadap penanganan Covid-19 ini, Bupati Tanah Datar menerbitkan Instruksi Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berpergian dan Keluar Rumah dan Instruksi Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warung Internet (Warnet). Instruksi Bupati nomor : 443/91/Gugus Tugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berpergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 memuat empat (4) point instruksi kepada masyarakat Tanah Datar, yakni:

- a. Kesatu, Masyarakat dilarang bepergian keluar rumah (malam hari) dimulai pada pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB kecuali untuk hal-hal yang penting dan mendesak seperti membeli

kebutuhan pokok, berobat atau hal-hal yang sangat penting lainnya dengan ketentuan memakai masker.

- b. Kedua, Unsur Pemerintah Kecamatan (Forkopinca), nagari dan jorong agar memantau dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini.
- c. Ketiga, Bagi masyarakat yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh pihak yang berwenang Satpol PP bersama TNI dan POLRI.
- d. Keempat, Instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Sementara itu dalam Instruksi Bupati nomor 443/22/GugusTugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet juga memuat empat (4) Instruksi kepada Pengusaha / Pengelola Warung Internet yakni:

- a. Kesatu, Pengusaha / Pengelola Warung Internet dilarang sementara waktu melaksanakan aktifitas dan Operasional Penyediaan Jasa Internet sampai berakhirnya penanganan pencegahan virus Corona (Covid-19).
- b. Kedua, Unsur Pemerintah Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Tanah Datar untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini di wilayah kerja masing-masing.
- c. Ketiga, Bagi Pengusaha/ Pengelola Warung internet yang tidak mematuhi instruksi ini akan ditindak oleh Satpol PP bersama TNI dan POLRI.
- d. Keempat, instruksi ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memastikan sumber daya manusianya mumpuni dalam penanganan Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Menurut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bahwa masih ditemukannya masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan

dirinya dan orang lain, “banyak ditemukan masyarakat masih berkerumun dan tidak menggunakan masker, seperti kerumunan di pasar dan acara perhelatan atau pesta pernikahan. Masih banyak dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang mengabaikan protokol kesehatan”. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan tindakan seperti teguran kepada oknum yang melanggar agar tidak mengulangi hal tersebut dan menerapkan dengan baik protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan logistik Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu berupa masker, *hand sanitizer*, *face shield*, dan peralatan medis lainnya dan diterima langsung oleh Pjs. Bupati Tanah Datar.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tanah Datar lakukan penyemprotan desinfektan di berbagai objek vital. Hal ini dalam upaya mencegah, mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perkembangan penyebaran wabah virus corona yang dirilis pemerintah setiap hari dan semenjak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan adanya dua pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19, 2 Maret 2020 yang lalu menunjukkan angka positif yang terus naik. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan melakukan penyemprotan desinfektan di objek-objek vital seperti Kantor Bupati Tanah Datar, Kantor DPRD, Istana Basa Pagaruyung, Masjid Nurul Amin, Kejari Tanah Datar, Pengadilan Negeri Batusangkar, Pasar Batusangkar dan objek vital lainnya. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Satpol PP, Damkar dan tim BPBD selaku koordinator ini bergerak dengan membagi tiga tim untuk melakukan penyemprotan.

Jadi, berdasarkan penjelasan informan di atas maka hasil temuan penelitian tentang upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah.
- b. Bupati Tanah Datar menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 443/91/GugusTugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Bepergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan Instruksi Bupati nomor 443/22/Gugus Tugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet
- c. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan *Coronavirus Disease***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu daerah menjalankan sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki otonomi di daerahnya untuk menjalankan visi dan misi dalam rangka memberikan keamanan dan keselamatan bagi rakyatnya. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kasus Covid-19. Ada empat kategori wilayah terkait penyebaran Covid-19 yaitu:

- a. Zona merah atau wilayah risiko tinggi
- b. Zona oranye atau wilayah risiko sedang
- c. Zona kuning atau wilayah risiko rendah
- d. Zona hijau atau wilayah tidak/belum terdampak

Selain menandai status bahaya dari sebuah wilayah yang terpapar Covid-19, zona warna juga digunakan untuk menandai protokol kesehatan yang harus diterapkan dan dipatuhi. Kabupaten Tanah Datar ditetapkan

sebagai zona oranye (risiko sedang) oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat dikarenakan kenaikan kasus Covid-19 pada bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Untuk itu, dibutuhkan kapabilitas yang mumpuni dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan melalui kapabilitasnya agar dapat menekan bahkan menghilangkan kasus Covid-19 di daerahnya.

Kapabilitas adalah kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Menurut Screyogg & Kliesch-Eberl “Kompleksitas kapabilitas mencerminkan adanya kebutuhan internal untuk menguasai tugas-tugas yang kompleks”. (2007). Kapabilitas organisasi yang didefinisikan oleh The Australian Public Service Commission (2014), yakni:

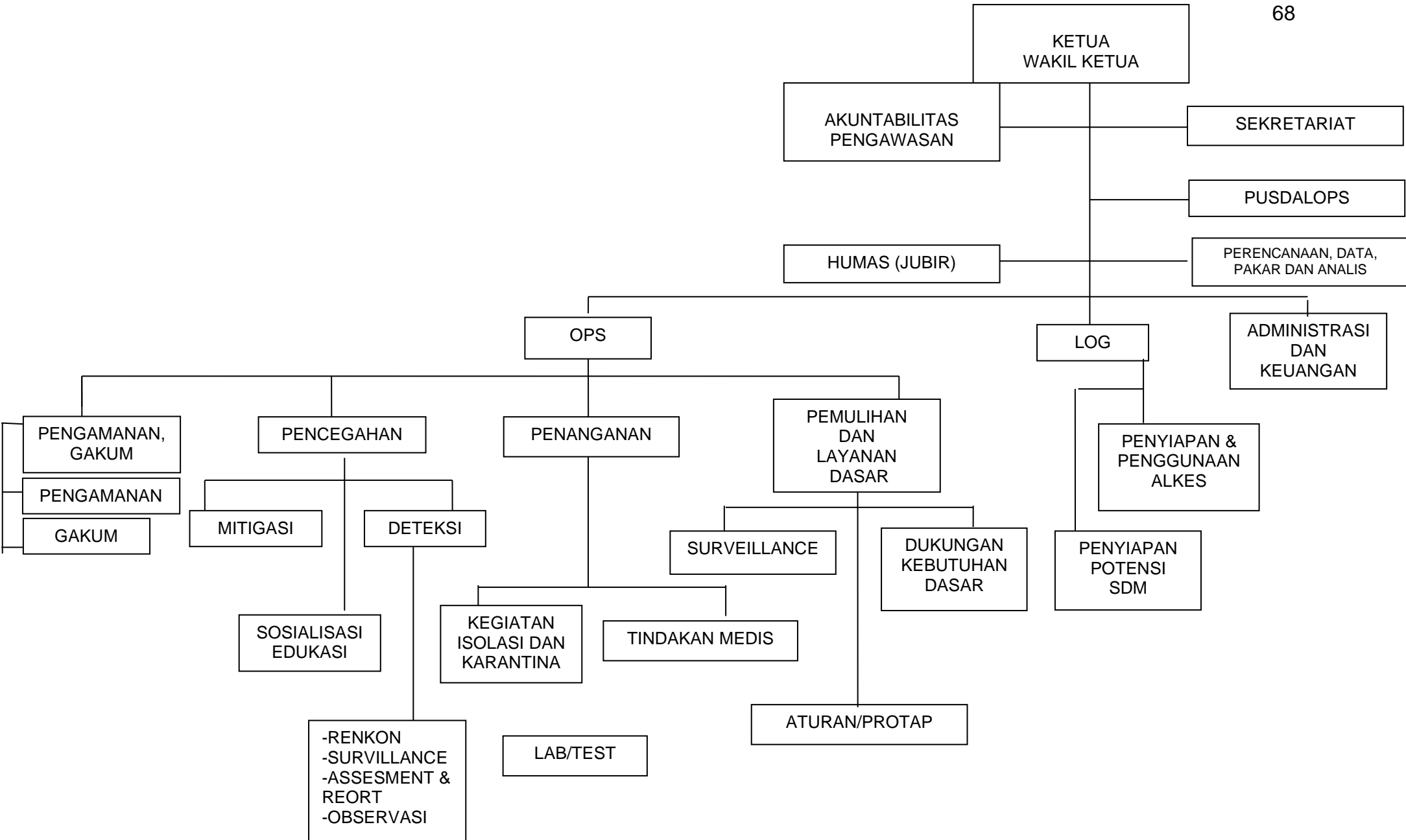
*“Organizational capability can be defined as: “The sum of the expertise of people and the capacity of the organization to apply this expertise”. Expertise is the combined of staff and comprises organizational knowledge, skills and human capital. Capacity is how the organization applies its expertise. Capability captures an organisation’s potential to achieve outcomes, the effectiveness with which outcomes are achieved and the quality of outputs and outcomes”.*

Kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian/kompetensi sumberdaya manusia (SDM) dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki SDM-nya, sehingga kapabilitas organisasi lebih dari sekedar sumber daya manusia tapi juga menyangkut “sistem” dan “proses”. Berikut pembahasan terkait kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan *coronavirus disease* 2019 di wilayah kerjanya, yaitu:

a. Kelembagaan

Menurut Kusumasari bahwa “pengaturan kelembagaan yang efektif haruslah memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah”. (2014:48). Artinya, sebuah kelembagaan

dikatakan efektif apabila lembaga tersebut memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu membina *networking* dengan semua level pemerintahan. Melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, maka terbentuklah sebuah tim yang tergabung dalam gugus tugas dengan struktur dan uraian tugas gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sebagai berikut:



Hal di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah sudah memiliki struktur, peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sejalan dengan hal tersebut menurut Hatch& Cunliffe (2006) pengaturan kelembagaan tersebut akan selalu membentuk tindakan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pejabat publik. Pengaturan yang menjadi patokan dalam gugus tugas mengarah kepada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut Kusumasari bahwa “dalam tugas penanggulangan bencana memerlukan kerja sama SDM yang didasarkan pada masalah dan upaya teknis terkait program masing-masing unit kerja”. (2014:48). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemulihan akibat bencana diperlukan keterpaduan beberapa program dan sektor terkait yang dapat dicapai melalui pertemuan berkala secara intensif. Berikut adalah SDM yang dibentuk dalam struktur keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Tanah Datar:

- |             |  |
|-------------|--|
| 1) KETUA    | : Bupati Tanah Datar                   |
| WAKIL KETUA | a) Wakil Bupati Tanah Datar            |
|             | b) Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar |
|             | c) Dandim 0307 Tanah Datar             |
|             | d) Kapolres Tanah Datar                |
|             | e) Kapolres Padang Panjang             |
|             | f) Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar |

- g) Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
- h) Ketua Pengadilan Agama Batusangkar
- i) Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
- j) Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

## 2) SEKRETARIAT

- Koordinator : Sekretaris Daerah
- Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD
- Anggota : a) Asisten Sekretaris Daerah
  - b) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  - c) Bagian Kesra
  - d) Bagian Hukum
  - e) Bagian Perekonomian dan SDA
  - f) Bagian Administrasi Pembangunan
  - g) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - h) Bagian Organisasi
  - i) Bagian Humas dan Protokol
  - j) Bagian Umum
  - k) BPBD

## 3) PUSDALOPS

- Koordinator : Kepala BPBD
- Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD
- Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar
  - b) Polres Tanah Datar
  - c) Polres Padang Panjang
  - d) BPBD
  - e) Dinas Kesehatan

- f) Dinas Kominfo
  - g) Dinas Sosial PPA
  - h) Dinas Satpol PP dan Damkar
  - i) PMI Kabupaten Tanah Datar
- 4) AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- Koordinator : Kepala Pelaksana BPBD
  - Sekretaris : Inspektur
  - Anggota : a) Kejaksaan Negeri Tanah Datar
  - b) Inspektorat
  - c) BPBD
- 5) HUMAS
- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo
  - Sekretaris : Kepala Bagian Humas dan Protokol
  - Anggota : a) Dinas Kesehatan
  - b) Dinas Kominfo
  - c) Bagian Humas dan Protokol
  - d) ORARI
  - e) RAPI
  - Juru Bicara : Kepala P2P Dinas Kesehatan
- 6) PERENCANAAN DATA, PAKAR DAN ANALIS
- Koordinator : Kepala Baperlitbang
  - Sekretaris : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperlitbang
  - Anggota : a) BPBD Tanah Datar
  - b) Kodim 0307 Tanah Datar
  - c) Polres Tanah Datar
  - d) Polres Padang Panjang
  - e) Baperlitbang
  - f) Dinas Kominfo
  - g) Dinas Kesehatan
  - h) Dinas Perhubungan

- i) Dinas PUPR
- j) Dinas Perkim LH
- k) Dinas Koperindag
- l) Dinas Pangan dan Perikanan
- m) Dinas Pertanian
- n) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- o) Dinas Sosial PPA
- p) Dinas PMD PPKB
- q) Satpol PP dan Damkar
- r) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM  
Batusangkar
- s) Kesbangpol
- t) Kecamatan
- u) Kantor Kementerian Agama
- v) Badan Pusat Statistik
- w) IAIN Batusangkar
- x) IDI Kabupaten Tanah Datar
- y) PPNI Kabupaten Tanah Datar

## 7) OPERASI

Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya  
Manusia dan Kemasyarakatan

### - Bidang Pencegahan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris : Kepala Satpol PP dan Damkar

Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar

b) Polres Tanah Datar

c) Polres Padang Panjang

d) BPBD

e) Dinas Kesehatan

f) Dinas Kominfo

g) Dinas Perhubungan

- h) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- i) Dinas Koperindag
- j) Dinas Perkim LH
- k) Dinas PUPR
- l) Dinas Pertanian
- m) Dinas Pangan dan Perikanan
- n) Dinas Sosial PPA
- o) Dinas PMD PPKB
- p) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM  
Batusangkar
- q) Kecamatan
- r) Kantor Kementerian Agama
- s) MUI Kabupaten Tanah Datar
- t) LKAAM Kabupaten Tanah Datar
- u) PMI Kabupaten Tanah Datar
- v) KONI Kabupaten Tanah Datar
- w) Kwarcab Pramuka
- x) BKPRMI

- Bidang Penanganan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Direktur RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah  
SM Batusangkar
- Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar
- b) Polres Tanah Datar
  - c) Polres Padang Panjang
  - d) Dinas Kesehatan
  - e) BPBD Kabupaten Tanah Datar
  - f) Dinas Perhubungan
  - g) Satpol PP dan Damkar
  - h) Dinas Sosial PPA
  - i) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM

Batusangkar

j) Kecamatan

k) IDI Kabupaten Tanah Datar

l) PPNI Kabupaten Tanah Datar

m) PMI Kabupaten Tanah Datar

- Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris : Kepala Dinas Sosial PPA

Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar

b) Polres Tanah Datar

c) Polres Padang Panjang

d) BPBD Kabupaten Tanah Datar

e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f) Dinas Perkim LH

g) Dinas PUPR

h) Dinas Pertanian

i) Dinas Pangan dan Perikanan

j) Dinas Sosial PPA

k) Dinas Koperindag

l) Dinas Parpora

m) Dinas PMPTSP Naker

n) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM

Batusangkar

o) Bagian Perekonomian dan SDA

p) Bagian Kesra

q) PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar

r) Perusda Tuah Sepakat

s) PMI Kabupaten Tanah Datar

- Bidang Pengamanan dan Gakum

Koordinator : Kepala Satpol PP dan Damkar

Sekretaris : Sekretaris Satpol PP dan Damkar  
 Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar  
 b) Polres Tanah Datar  
 c) Polres Padang Panjang  
 d) Kejaksaan Negeri Tanah Datar  
 e) Kejaksaan Negeri Padang Panjang  
 f) Satpol PP dan Damkar  
 g) Kesbangpol

#### 8) LOGISTIK

Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,  
 Politik dan Hukum

- Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah

Koordinator : Kepala BKD

Sekretaris : Sekretaris BKD

Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar

b) Polres Tanah Datar

c) Polres Padang Panjang

d) BKD

e) BKPSDM

f) Dinas Sosial PPA

g) Dinas Dikbud

h) Dinas Kominfo

i) Dinas PMPTSP Naker

j) Dinas PMD PPKB

k) Kecamatan

l) PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah  
 Datar

m) Perusda Tuah Sepakat

n) IKTD se-Nusantara

- Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD
- Anggota : a) Kodim 0307 Tanah Datar  
 b) Polres Tanah Datar  
 c) Polres Padang Panjang  
 d) Dinas Dikbud  
 e) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM  
 Batusangkar  
 f) IDI Kabupaten Tanah Datar  
 g) PPNI Kabupaten Tanah Datar

#### 9) ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- Koordinator : Kepala Pelaksana BPBD
- Sekretaris : Sekretaris BPBD
- Anggota : a) BKD  
 b) BPBD  
 c) Dinas Kesehatan  
 d) Dinas Kominfo  
 e) Dinas Perhubungan  
 f) Satpol PP dan Damkar  
 g) Dinas Sosial PPA  
 h) RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM  
 Batusangkar  
 i) Kecamatan

Berdasarkan struktur keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Tanah Datar di atas maka dapat dilihat bahwa semua instansi/lembaga yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berperan aktif dan tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Semua lembaga yang tergabung dalam gugus tugas memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Mereka juga saling kerja sama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Sejalan dengan hal di atas bahwa SDM yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan perspektif mikro menurut Flippo yaitu “sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan”. (dalam Handoko 2000). Artinya, SDM yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sudah di atur sedemikian rupa sesuai dengan tujuannya yaitu membantu Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kerjanya.

c. Keuangan

Menurut Kusumasari bahwa “pada dasarnya, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah”. (2014:48). Dimana pemerintah dan pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 angka (1) dan (2) Undang-Undang 24 tahun 2007. Anggaran yang digunakan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memiliki anggaran sekitar 60 Milyar Rupiah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat berpenghasilan rendah terdampak pandemi Covid-19.

d. Sumber Daya Teknis

Menurut Kusumasari bahwa “memiliki sistem logistik manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat

memang yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana”. (2014:48). Selain itu juga sistem informasi teknologi dan jaringan komunikasi antara organisasi, masyarakat dan perwakilan media haruslah memadai.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam Perbup tersebut berisikan tentang penegasan agar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dan akan diberikan sanksi jika dilanggar. Kepala Satuan (Kasat) Pol PP dan Damkar Tanah Datar Yusnen menyampaikan bahwa Perbup tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang pedoman teknis penyusunan perda dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerima bantuan logistik Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa masker, *hand sanitizer*, *face shield* dan peralatan medis lainnya untuk mendukung sumber daya teknis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar hanya menyediakan 1 rumah sakit untuk isolasi bagi pasien positif Covid-19 yang memiliki penyakit bawaan dan tidak memiliki bangunan untuk isolasi bagi mereka yang positif Covid-19 namun tanpa gejala. Sehingga menggunakan ruang diklat Kemendagri di Baso, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat untuk karantina wilayah bagi mereka yang positif Covid-19 tanpa gejala dan atau Orang Dalam Perjalanan (ODP).

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas maka menurut peneliti bahwa kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum maksimal, karena dari sisi sumber daya manusia hanya memiliki 1 tenaga dokter spesialis paru dan dari sisi sumber daya teknis hanya memiliki 1 rumah sakit untuk isolasi pasien Covid-19 dengan gejala dan penyakit bawaan serta tidak memiliki bangunan untuk isolasi bagi pasien Covid-19 yang positif namun tidak bergejala atau biasa disebut dengan Orang Tanpa Gejala (OTG). Sehingga dibutuhkan peningkatan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Dengan begitu diharapkan Kabupaten Tanah Datar bebas dari pandemi Covid-19.

#### **4.3.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanganan *Coronavirus Disease***

Persoalan kemanusiaan selalu menjadi titik fokus utama dari setiap permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Sejarah membuktikan bahwa dominasi manusia di atas manusia lain selalu terjadi pada setiap periode kesejarahan peradaban manusia dalam bentuk yang variatif. Pandemi Covid-19 menjadi *trend* pembahasan di berbagai media, interaksi sosial antara individu satu dengan yang lain semakin berjarak, padahal hal itu pun sejatinya sudah terus diperenggang oleh hadirnya sosial media dengan segala inovasinya. Sehingga munculah perbedaan-perbedaan baru pada masyarakat dalam hal penyikapan sebuah fenomena yang cenderung dibiarkan. Fenomena Covid-19 ini pun tidak sedikit mengikis nilai-nilai sosial pada masyarakat sebagai makhluk sosial. Munculnya sistem *lockdown* dan *social distancing* merupakan reaksi sekaligus upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi ini.

Disisi lain hal sedemikian merupakan bentuk lain dari proses dehumanisasi, walaupun langkah tersebut ditujukan untuk meminimalisir penyebaran virus dengan efektivitas cukup tinggi, namun ia pun berpotensi mendorong masyarakat beranggapan bahwa semua manusia adalah inangbagi virus ini. Semua orang memang memiliki potensi untuk

terjangkit virus corona ini, namun tidak berarti bahwa seluruh manusia adalah inang baginya. Lambatnya proses identifikasi atas orang yang positif terinfeksi merupakan sebuah gambaran nyata tentang kesiapan dan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana ini. Sedangkan potensi terlahirnya sebuah asumsi tak berdasar pada yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, merupakan gambaran atas kualitas intelektualitas serta kepemimpinannya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus melakukan upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya agar potensi ancaman Covid-19 bisa dientaskan.

Menurut Ngajeman kata “upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai tujuan”. (1990:177). Menurut Baskoro “Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). (2005:902). Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata “upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya”. (1991:1109). Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menggelar pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai evaluasi Percepatan Penangan Penyebaran Covid-19 yang juga dihadiri oleh Dandim 0307 Tanah Datar Letkol. Inf. Edi S Harahap, Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Hariadi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar Hardijono Sidayat dan juga dihadiri Sekda Irwandi didampingi Kabag Humas dan Protokol Yusrizal pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 di rumah dinas Bupati di Indojolito Batusangkar. Bupati Irdinansyah dalam sambutannya, mengatakan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik dan dukungan Forkopimda kepada Gugus Tugas dan telah bekerja keras dari awal pembentukan, berbagai langkah telah diambil, bersamaan dengan itu ke depan yang perlu langkah cepat adalah

antisipasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut merupakan foto dokumentasi pertemuan Bupati Tanah Datar dengan Forkopimda dalam rangka evaluasi penanganan Covid-19:



Sumber: Lintas SKPD, 2020.

Gambar di atas merupakan pertemuan Bupati Tanah Datar dengan Forkopimda dalam rangka evaluasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Irwandi menyampaikan laporan upaya percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Datar yaitu:

“Setelah dinyatakan pandemi Covid-19, Pemda membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid19 dilengkapi posko gugus, dan telah melakukan berbagai hal, mulai media center atau pusat informasi, tempat gelar rapat pengambilan kebijakan terkait wabah sebagai titik awal kerja tim edukasi, penyemprotan desinfektan dan beberapa kegiatan lainnya, termasuk sebagai pos menerima dan distribusikan APD dari pihak ketiga kepada yang membutuhkan”.

Selanjutnya pada pertemuan tersebut mengenai upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar, setidaknya ada 2 point penting yang dilakukan yaitu:

- a. Melakukan survey dan tinjauan ke semua puskesmas di Kabupaten Tanah Datar terhadap kasus yang dicurigai mempunyai indikasi Covid-19.
- b. Menerbitkan edaran dan imbauan Bupati, yang disampaikan melalui radio, media massa, maupun media sosial resmi Pemkab Tanah Datar lainnya, seperti *social distancing*, *physical distancing* dan *work from home* (WFH) bagi ASN serta mendukung pemerintah pusat, provinsi dan MUI terkait pelaksanaan ibadah dan keramaian.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah dengan mengeluarkan surat kepada walinagari se-Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh *stake holder*, organisasi masyarakat dan relawan Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi, dalam pelaksanaan implementasi dari upaya tersebut masih ditemukannya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sehingga jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar makin bertambah.

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan penyemprotan desinfektan, penyuluhan kepada masyarakat, penerapan protokol kesehatan dan menerbitkan instruksi Bupati serta aturan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Akan tetapi, upaya tersebut masih belum berjalan secara optimal, karena kasus Covid-19 masih ada di Kabupaten Tanah Datar. Kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan juga menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19

di wilayah kerjanya. Sehingga status wilayah zona oranye akan sulit dirubah menjadi status wilayah zona hijau.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis dengan pendekatan teoritis dan metodologi penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

- a. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya belum maksimal, dimana memiliki kelemahan di bidang sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Artinya, perlu adanya peningkatan kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya.
- b. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan, penyuluhan ke masyarakat dan pengecekan orang masuk di perbatasan daerah, menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 443/91/GugusTugas-2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berpergian dan Keluar Rumah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan Instruksi Bupati nomor 443/22/Gugus Tugas-2020 tentang Pemberhentian Aktivitas dan Operasional Warnet Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penerapan protokol kesehatan. Upaya tersebut belum berjalan optimal, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat meningkatkan kapabilitasnya dari sisi sumber daya manusia dengan menambah jumlah dokter spesialis paru dan sumber daya teknis dengan mengalihfungsikan bangunan dan gedung pertemuan sebagai rumah sakit penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Sehingga percepatan pemutusan mata rantai Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar dapat direalisasikan dengan baik.
- b. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat mengupayakan sistem *Community Based Disaster Management* (CBDM) sebagai sebuah pendekatan yang mendorong komunitas dalam mengelola risiko bencana sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya. Selanjutnya kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan dapat diiringi dengan pemberian sanksi dan teguran tegas agar masyarakat bersedia patuh dan tunduk terhadap protokol kesehatan demi keberlangsungan keselamatan jiwa masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir, M Taufik. (2011). *Manajemen strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- AS, Moenir. (2001). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). (2015). *Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia*. Direktorat Politik dan Komunikasi.
- Baskoro, W. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- Brauch, Hans Gunter. (2015). "Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risk of the Environment Security Dimension form a Human Perspective". *International Security, Peace, Development and Environment, 1*. Berlin: Otto-Suhr Institute for Political Science, Free University of Berlin.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Database Kebencanaan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar.
- Handoko, T.H. (2000). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia Edisi2*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hatch & Cunliffe. (2006). *Organizational Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspective*. USA: Oxford University Press.
- Hewit, K. (1998). *Interpretation of Calamity*, (New York: Allen & Unwin).
- Gomez, O dan Gasper, D. (2013). *Human Security: A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Kapabilitas Organisasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kusumasari, Bevaola. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
- Ngajeman, M. (1990). *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang: Dahara Prize.
- Paleri, P. (2008). *Imperatives and Challenges National Security*. New Delhi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. (2010). *Buku Putih Kabupaten Tanah Datar*. Batusangkar: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Samego, I. (2001). *Sistem Pertahanan-Keamanan Negara. Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sampurno. (2011). *Manajemen strategi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

- Tamin, I. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*. Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung.
- Terry, G.R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Alih Bahasa J.Smith. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wulan, A.R. (2008). *Sistem Keamanan Nasional Indonesia* . Jakarta: Pacivis Center for Global Civil Society Studies.

### **Tesis dan Jurnal**

- Adityo Susilo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 7, No 1*.
- Ariantoni. (2009). Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Axworthy, L. (1997). Canada and Human Security: The Need for Leadership. *International Journal*. Vol. 52, No. 2. p. 183-196.
- Darmono, Bambang. (2010). "Konsep Sistem Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 15(1), pp. 2-41.
- Korib, Mondastri, *Bencana dan Kerawanan Masyarakat*, Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung.
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(3), p. 251-263.
- Pribadi, Krisna S. (2007). *Konsep Pengelolaan Bencana*. Makalah TOT Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama, Pusat Mitigasi Bencana ITB Bandung.
- Screyogg & Kliesch-Eberl. (2007). *How Dynamic Can Organizational Capabilities Be? Towards a Dual-Process Model of Capability Dynamization*. *Strategic Management Journal*, 28, 913-933.

Sopaheluwakan, J. (2006). Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta: LIPI-UNESCO/ISDR.

Susetyo, Heru. (2008). "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 6(1), Desember, pp. 1-10.

Tim CIS Form UIN Sunan Kalijaga. (2007). *Cerdas Menghadapi Bencana. Persiapan, Penanganan dan Tips Menghadapi Bencana Alam*. Yogyakarta: CISForm.

### **Undang-Undang dan Dokumen Pemerintahan**

Instruksi Bupati Tanah Datar Nomor:188/334/BK-PSDM-2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Instruksi Bupati Tanah Datar Nomor:800/57/DIKBUD-2020 Tentang Penyelenggaraan Pesta Pernikahan Pada Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang pedoman teknis penyusunan perda dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Datar Nomor:04/Maklumat-MUITD/IV/2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor:420/1921/DIKBUD-2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi Coovid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

### Website

Aida, N.R. (2020). *Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sem-buh-8732>  
 diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

Covid-19. (2020). *Data Pantauan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar*.  
 Covid-19.tanahdatar.go.id. Diakses Tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 20.52 WIB.

Data Pantauan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar.  
<https://Covid-19.tanahdatar.go.id/>. Diakses Tanggal 06 Juni 2020 Pukul 07.58 WIB.

Egeham, L. (2020). *HEADLINE: Covid-19 Pandemi Global, Bagaimana Protap dan Koordinasi Pusat-Daerah di Indonesia?*  
<https://www.liputan6.com/news/read/4201341/headline-Covid-19-pandemi-global-bagaimana-protap-dan-koordinasi-pusat-daerah-di-indonesia#>. Diakses tanggal 04 April 2020 Pukul 06.25 WIB.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  
<https://covid19.go.id/>. Diakses tanggal 20 Juni 2020 Pukul 06.16 WIB.

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/BPBD-PROVINSI-LAMPUNG.pdf>. Diakses pada 18 Juli 2020 Pukul 09.08 WIB.

<http://www.pitt.edu/~epi2170/lecture15/sld001.htm>. Diakses pada 14 Desember 2019 Pukul 08.05 WIB.

<https://kawalcovid19.id/>. Diakses pada 12 Mei 2020 Pukul 14.30 WIB.

<https://www.kompas.com/Covid-19>. Diakses pada 12 Mei 2020 Pukul 14.32 WIB.

Lintas SKPD. (2020). *Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Tanah Datar Keluarkan Dua Instruksi*.

<https://tanahdatar.go.id/berita/3894/cegah-penyebaran-Covid-19-bupati-tanah-datar-keluarkan-dua-instruksi.html>. Diakses Tanggal 08 September 2020 Pukul 10.18 WIB.

\_\_\_\_\_. (2020). Bupati Irdinansyah Bersama Forkopimda Evaluasi Penanganan Covid-19.

<https://tanahdatar.go.id/berita/3917/bupati-irdinansyah-bersama-forkopimda-evaluasi-penanganan-Covid-19.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2021 pukul 10.03 WIB.

Posko Gugus Tugas Kabupaten Tanah Datar Tanggap Covid 19

<http://Covid-19.tanahdatar.go.id/>. Diakses Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.

Putra, N.P. (2020). *Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 34 Provinsi 15 Juni 2020*.

<https://www.liputan6.com/news/read/4279830/sebaran-pasien-positif-Covid-19-di-34-provinsi-15-juni-2020>. Diakses tanggal 20 Juni 2020 Pukul 08.07 WIB.

Situation Report WHO.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>. Diakses pada 20 Juni 2020 Pukul 06.01 WIB.

Tanah Datar. (2020). *Galodo Malalo, Dua Korban Ditemukan Meninggal Dunia*.

<https://tanahdatar.go.id/berita/3901/galodo-malalo-dua-korban-ditemukan-meninggal-dunia.html>. Diakses tanggal 03 Mei 2020 Pukul 21.32 WIB.

Topsatu.com. (2020). *Kasus Positif Covid-19 di Tanah Datar Naik Jadi 66 Orang*.

<https://www.topsatu.com/kasus-positif-Covid-19-di-tanah-datar-naik-jadi-66-orang/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 20.45 WIB.

UNU. (2018). *Human Security and Natural Disaster*. Institute for Sustainability and Peace.

<http://isp.unu.edu/research/human-security/>. Diakses tanggal 12 Juli 2020 Pukul 09.55 WIB.

Website Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

<https://tanahdatar.go.id/foto/3999/peta-sebaran-Covid-19.html>.

Diakses Tanggal 30 Desember 2020 Pukul 09.18 WIB.

Wijaya, C. (2020). Virus Corona: Definisi, Gejala, Penyebaran, dan Pencegahannya.

<https://www.deherba.com/apa-itu-virus-corona.html>. Diakses tanggal 04 April 2020 Pukul 06.45 WIB.

[www.kkbi.com/](http://www.kkbi.com/). Diakses pada 15 Desember 2019 Pukul 17.04 WIB.

Zian. (2020). *Belum Cukup Satu Bulan New Normal, Tanah Datar Pagi ini Diguncang 3 Kasus Positif Covid-19.*

<https://sumbar.kabardaerah.com/2020/07/02/belum-cukup-satu-bulan-new-normal-tanah-datar-pagi-ini-diguncang-3-kasus-positif-Covid-19/>. Diakses Tanggal 12 Juli 2020 Pukul 07.56 WIB.

**LAMPIRAN-1****PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN**

<b>Kategori Informan</b>	<b>Pemerintah/Dunia Usaha</b>
<b>Nama</b>	
<b>Jenis Kelamin</b>	
<b>Tempat dan Tanggal Lahir</b>	
<b>Alamat</b>	
<b>Pekerjaan/Jabatan</b>	
<b>Kondisi Kesehatan</b>	

**Pertanyaan Penelitian:**

Pertanyaan penelitian diberikan kepada subyek yang terdiri dari Pemerintah dan Dunia Usaha. Pertanyaan penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan Covid-19 guna mendukung keamanan nasional?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Tanah dalam penanganan Covid-19 guna mendukung keamanan nasional?

**LAMPIRAN-2****DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN****A. Kepada Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya**

No	Pertanyaan
1	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?
2	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?
3	Sejauh mana partisipasi antar lembaga terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?
4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?
5	Apa saja kendala yang dihadapi lembaga dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19?
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?
8	Apakah seluruh personel di lembaga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?
9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19?
10	Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan Covid-19?

## B. Kepada Dunia Usaha

No	Pertanyaan
1	Apa yang dilakukan oleh pemilik usaha pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?
2	Apa yang dilakukan oleh pemilik usaha sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?
3	Sejauh mana partisipasi terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?
4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?
5	Apa saja kendala yang dihadapi pemilik usaha dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19 di lokasi usaha anda?
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?
8	Apakah seluruh karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?
9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19 di lokasi usaha anda?
10	Bagaimana kapabilitas dunia usaha anda dalam rangka penanganan Covid-19?

**LAMPIRAN-4****Transkrip Wawancara Dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Irwandi, S.Ip., M.Si**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?	Sebelum adanya kasus Covid-19 di Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar kami belum melakukan apa-apa. Kami menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Namun, untuk kegiatan prabencana dilaksanakan oleh BPBD seperti pencegahan, mitigasi, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan.
2	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?	Setelah masuknya kasus pertama Covid-19 di Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar, kami belum melakukan apa-apa karena secara profesional kami menunggu instruksi dan arahan serta kebijakan dari Pemerintah Pusat.
3	Sejauh mana partisipasi antar lembaga terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Partisipasi antar lembaga di satuan tugas dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terbangun dengan baik.

4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?	Upaya kerjasama yang dibangun selama ini dalam satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
5	Apa saja kendala yang dihadapi lembaga dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?	Selama ini tidak terdapat kendala dalam partisipasi dan kerjasama antar lembaga dalam satuan tugas. Namun kendala yang cukup dirasakan adalah kesadaran masyarakat untuk mau mengikuti protokol kesehatan.
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Semua lembaga terlibat yang tergabung dalam satuan tugas yang dikepalai oleh sekretaris daerah pada awalnya, namun ada perubahan yaitu Bupati langsung menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19.
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?	Kerjasama yang dibangun cukup intensif melalui koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
8	Apakah seluruh personil di lembaga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?	Iya

9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19?	Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan satuan tugas penanganan Covid-19 melakukan monitoring dalam bentuk koordinasi dan komunikasi serta evaluasi dengan lembaga yang terlibat.
10	Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan Covid-19?	Satuan tugas Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan segenap upaya dan juga melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam rangka penanganan Covid-19.

**LAMPIRAN-5****Transkrip Wawancara Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Thamrin, S.T**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?	Sebelum adanya Covid-19 dilakukan kegiatan prabencana yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?	Untuk diawal, kami belum melakukan apa-apa, karena menunggu instruksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
3	Sejauh mana partisipasi antar lembaga terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Partisipasi antar lembaga dalam satuan tugas di Kabupaten Tanah Datar sangat terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19.
4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?	Upaya kerjasama yang dibangun selama ini dalam satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

5	Apa saja kendala yang dihadapi lembaga dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?	Selama ini tidak terdapat kendala dalam partisipasi dan kerjasama antar lembaga dalam satuan tugas. Namun kendala yang cukup dirasakan adalah kesadaran masyarakat untuk mau mengikuti protokol kesehatan.
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Semua lembaga terlibat yang tergabung dalam satuan tugas yang dikepalai oleh sekretaris daerah pada awalnya, namun ada perubahan yaitu Bupati langsung menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19.
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?	Kerjasama yang dibangun cukup intensif melalui koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
8	Apakah seluruh personel di lembaga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?	Iya
9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19?	BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 bertugas mengaktifkan posko gugus tugas, artinya penggerak operasional dalam penanganan Covid-19.

10	Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan Covid-19?	Satuan Tugas Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan segenap upaya dan juga melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam rangka penanganan Covid-19.
----	--	---

**LAMPIRAN-6****Transkrip Wawancara Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Ibu Ns. Roza Mardiah, S.Kep., M.Kep**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?	Sebelum masuknya persebaran Covid-19 di Indonesia, dinas kesehatan sudah mendapatkan intruksi dari Kemenkes untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19. Karena adanya kasus pertama di Malaysia.
2	Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?	Untuk di awal adanya kasus Covid-19 di Indonesia, kami belum melakukan apa-apa. Namun, setelahnya kami melakukan upaya kewaspadaan terhadap Covid-19.
3	Sejauh mana partisipasi antar lembaga terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Partisipasi antar lembaga di satuan tugas dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar terbangun dengan baik.
4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?	Upaya kerjasama yang dibangun selama ini dalam satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar adalah dengan koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

5	Apa saja kendala yang dihadapi lembaga dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?	Selama ini tidak terdapat kendala dalam partisipasi dan kerjasama antar lembaga dalam satuan tugas. Namun kendala yang cukup dirasakan adalah kesadaran masyarakat untuk mau mengikuti protokol kesehatan.
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Semua lembaga terlibat yang tergabung dalam satuan tugas yang dikepalai oleh sekretaris daerah pada awalnya, namun ada perubahan sehingga Bupati langsung menjadi ketua satuan tugas penanganan Covid-19.
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?	Kerjasama yang dibangun cukup intensif melalui koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
8	Apakah seluruh personel di lembaga memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?	Iya
9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19?	Dinas Kesehatan selalu melakukan monitoring terhadap tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Tanah Datar dan melakukan evaluasi terhadap penanganan Covid-19.

10	Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan Covid-19?	Satuan tugas Kabupaten Tanah Datar sudah melakukan segenap upaya dan juga melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pusat dalam rangka penanganan Covid-19.
----	--	---

**LAMPIRAN-7****Transkrip Wawancara Dengan Kepala UPT Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Bapak Ridwan, S.Sos**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1	Apa yang dilakukan oleh Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?	Kegiatan sebelum masuknya persebaran Covid-19 yaitu mengikuti aturan dari Pemerintah Daerah tentang tiket masuk ke dalam objek wisata Istano Basa Pagaruyung.
2	Apa yang dilakukan oleh Istano Basa Pagaruyung sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?	Pada awalnya kami belum melakukan tindakan apapun, karena menunggu instruksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
3	Sejauh mana partisipasi Istano Basa Pagaruyung terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Kami berpartisipasi dalam pengurangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan terhadap tamu dan wisatawan yang mengunjungi objek wisata Istano Basa Pagaruyung.

4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?	Upaya kerjasama yang dibangun selama ini dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar terjalin dengan baik. Istan Basa Pagaruyung mendapatkan cairan disinfektan untuk sterilisasi lokasi wisata.
5	Apa saja kendala yang dihadapi Istan Basa Pagaruyung dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?	Belum ada kendala yang dialami oleh personil kami dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun dalam percepatan penanganan Covid-19.
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Istan Basa Pagaruyung?	Seluruh personil melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19 di lingkungan objek wisata Istan Basa Pagaruyung.
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?	Pola kerjasama yang dibangun cukup intensif dalam bentuk koordinasi dan komunikasi sesama personil.
8	Apakah seluruh personil di Istan Basa Pagaruyung memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?	Iya, karena saya mengharuskan personil untuk selalu update informasi dan perkembangan tentang Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19 di Istano Basa Pagaruyung?	Objek wisata Istano Basa Pagaruyung selalu di monitor dan pantau oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Setiap minggu kami selalu melakukan evaluasi dalam penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19 di Istano Basa Pagaruyung.
10	Bagaimana kapabilitas personil Istano Basa Pagaruyung dalam rangka penanganan Covid-19?	Kami masih merasa kekurangan personil namun untuk fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai serta sejauh ini kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik.

**LAMPIRAN-8****Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Dangau Sawah Tengah Chanta Bapak Parlin**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	2	3
1	Apa yang dilakukan oleh pemilik usaha pada tahap pra bencana yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19?	Sebagai pemilik usaha kuliner di Kabupaten Tanah Datar, kami selalu memberikan instruksi kepada karyawan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu yang datang.
2	Apa yang dilakukan oleh pemilik usaha sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sejak ditemukannya kasus pertama di Indonesia?	Pada saat itu kami belum melakukan apa-apa. Namun, setelah adanya arahan dan kebijakan mengenai protokol kesehatan, kami langsung menerapkannya.
3	Sejauh mana partisipasi terbangun dalam menghadapi pandemi Covid-19?	Kami beserta para karyawan memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan.

4	Bagaimana upaya kerjasama yang dibangun selama ini?	Upaya yang kami lakukan bersama karyawan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dan saling berkoordinasi serta berkomunikasi dengan alat bantu HT yang kami berikan kepada karyawan.
5	Apa saja kendala yang dihadapi pemilik usaha dalam partisipasi dan kerjasama yang dibangun?	Jika tamu yang datang membludak dan banyak, kami dengan terpaksa membatasi hal itu dan hal itu terkadang banyak dikecewakan oleh tamu/pelanggan yang ingin makan ditempat kami.
6	Siapa saja yang melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Cafe Chanta?	Saya dan seluruh karyawan saya.
7	Sejauh mana intensif pola kerjasama yang dibangun?	Kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan alat bantu HT. Sehingga penerapan protokol kesehatan dapat kami monitor dengan baik.
8	Apakah seluruh karyawan memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam penanganan pandemi Covid-19?	Kami selalu memberikan arahan kepada karyawan, agar selalu update informasi dan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.

9	Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19 di Cafe Chanta?	Setiap saat kami selalu monitor dan mengeksekusi langsung ke lapangan dengan mengitari seluruh kawasan usaha kami. Evaluasi kami lakukan jika ada temuan kendala di lokasi usaha kami.
10	Bagaimana kapabilitas Cafe Chanta dalam rangka penanganan Covid-19?	Kami sangat <i>support</i> Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam memberantas penyebaran Covid-19 ini. Sehingga, hal itu membuat kami selaku pemilik usaha juga intens dan mengikuti seluruh kebijakan yang diterapkan.

**LAMPIRAN-9****Dokumentasi Pasca Interview Bersama Narasumber**



## LAMPIRAN-10

## Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Pertahanan

 <b>KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN</b>	
Nomor : B/ 11 /IX/2020	Bogor, 22 September 2020
Klasifikasi : Biasa	
Lampiran : 1 (Satu) Lembar.	
Hal : Permohonan Izin Penelitian	Kepada
	Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di Tempat
<p>1. Dasar:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.</p> <p>b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.</p> <p>2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:</p> <p>a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.</p> <p>b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Bayu Anggi Nugraha NIM: 120190301007, nomor HP: 082383442610, alamat email: bayuan1989@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 Guna Mendukung Keamanan Nasional (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)".</p> <p>3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.</p> <p>4. Demikian mohon menjadi periksa.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Rektor Universitas Pertahanan Wakil Did. Akademik dan Kemahasiswaan,</p> <div style="text-align: center;">    </div> <p>Dr. Joeri Mawreza, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR Mayor Jenderal TNI</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekjen Kemhan RI</li> <li>2. Rektor Unhan</li> <li>3. Dekan FKN</li> <li>4. Karo Aka Unhan.</li> <li>5. <u>Bupati Tanah Datar.</u></li> </ol> <p style="text-align: center;">Salemba Raya No. 14. Telepon 021-29618766</p>	

Lampiran Surat Rektor Unhan  
Nomor : B/ 11 /IX/2020  
Tanggal : 22 September 2020

#### DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Tanah Datar
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Datar
4. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tanah Datar
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kab. Tanah Datar
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar
7. Kepala Dinas Sosial Kab. Tanah Datar
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanah Datar
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanah Datar
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tanah Datar
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanah Datar
12. Kepala Polres Kab. Tanah Datar
13. Komandan Komando Distrik Militer 0307/Kab. Tanah Datar


a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Dr. Joni Mabrora, S.IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
Mayor Jenderal TNI

## LAMPIRAN-11

## Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**(KESBANGPOL)**

Jln. Raya Batusangkar – Bukittinggi Simpang Asrama Jorong Simpuruik Kec. Sungai Tarab

---

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**  
**Nomor : 070/581 /KESBANGPOL/2020**


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat dari Kementerian Pertahanan RI Universitas Pertahanan Nomor :B/11/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Rekomendasi Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: BAYU ANGGI NUGRAHA
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta Selatan/ 09 Maret 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Perumnas Dobok Blok D/3, Kec. Lima Kaum
Kartu Identitas	: KTP. 1304040903890001
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH PENEGANGAN <i>CORONA VIRUS DISEASE 2019</i> GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT)"
Lokasi Penelitian	: 1. Sekretaris Daerah Kab. Tanah Datar 2. BPBD Kab. Tanah Datar 3. Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar 4. Istana Basa Pagaruyung 5. Cafe Chanta
W a k t u	: 23 September s.d 10 Desember 2020
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 23 September s.d 10 Desember 2020.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 23 September 2020  
 An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 KASI KETAHANAN BANGSA,  
  
**GUSMAWATI SH**  
 NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Sekretariat Daerah Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
6. Kepala BPBD Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
7. Kepala Dinas PARPORA Kab. Tanah Datar.
8. UPT Istana Pagaruyung di Batusangkar
9. Pimpinan Cafe Chanta di Batusangkar
10. Rektor Universitas Pertahanan di Bogor.
11. Yang bersangkutan...

## LAMPIRAN-12

## Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar


**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 73185 - 71001 Fax. 574000  
 BATUSANGKAR 27281

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 070/080/Bag.Umum-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :


a. Nama : IRWANDI, S.IP, M.Si  
 b. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama/NIP : BAYU ANGGI NUGRAHA  
 b. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta Selatan/ 09 Maret 1989  
 c. Pekerjaan : Mahasiswa  
 d. Alamat : Perumnas Dobok Indah Blok D/3. Kecamatan Lima kaum  
 e. Judul Penelitian : Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Penangan Corona Virus Disease 2019 Guna Mendukung Keamanan Nasional (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat)

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 23 September s/d 10 Desember 2020


Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Batanghari, 26 Januari 2021  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
  
 IRWANDI, S.IP, M.Si  
 Panglima Utama Madya, IV/d  
 19680504 199009 1 001

Tembusan :  
 Yth : 1. Bupati Tanah Datar

## LAMPIRAN-13

## Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BPBD Kabupaten Tanah Datar


**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( B P B D )**  
 Jln. Suprpto No. 03 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219  
 Yahoo Email : [bpbd\\_tanah\\_datar@yahoo.co.id](mailto:bpbd_tanah_datar@yahoo.co.id) / Gmail : [bpbdtanahdatar.trc@gmail.com](mailto:bpbdtanahdatar.trc@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 070/204/Sekre - 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **THAMRIN, ST**  
 NIP : 19660107 199403 1 004  
 Pangkat / Golongan.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BAYU ANGGI NUGRAHA**  
 Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta Selatan, 9 Maret 1989  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Perumahan Dobok Blok D/3, Kecamatan Lima Kaum

Telah melakukan pengambilan data penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan judul : **Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 Guna Mendukung Keamanan Nasional ( Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat).**


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Batusangkar, 26 November 2020

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**  
  
**THAMRIN, ST**  
**NIP: 19660107 199403 1 004**

## LAMPIRAN-14

## Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR</b> <b>DINAS KESEHATAN</b> Jln. Sultan Alam Bagagarsyah – Telp. No. ( 0752 ) 71081. <b>BATUSANGKAR - 27281</b>
Batusangkar, 8 Januari 2021 M 24 Jumadil Awal 1442 H	
Nomor : 070 / 28 / Dinkes-SDK/I/2021	Kepada:
Sifat : Biasa	Yth: Direktur Program Pascasarjana
Lampiran : -	Universitas Pertahanan RI
Perihal : <b>Surat Keterangan Selesai Penelitian</b>	di
	Batusangkar

Sehubungan dengan Surat Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar Nomor 070/581/KESBANGPOL/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Izin Penelitian Tesis, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama	: Bayu Anggi Nugraha
NIK	: 1304040903890001
Judul	: Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019

Bahwa mahasiswa tersebut diatas sudah selesai melakukan penelitian pada tanggal 23 September s/d 10 Desember 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**  
dr. YESRITA ZEDRIANIS, M.Kes  
 Pembina TK I, IV/b  
 NIP. 19650906 199903 2 001

Tembusan Yth;

1. Kepala Kesbangpol Tanah Datar
2. Peringgal

## LAMPIRAN-15

### Surat Keterangan dari UPT Istano Basa Pagaruyung

#### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 556 / 60 /ISTANO-TD/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN, S.Sos**  
 NIP : 19710716 199303 1 005  
 Jabatan : Pengelola Istano Basa Pagaruyung

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/581/KESBANGPOL/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama personil sebagai berikut :

Nama : **BAYU ANGGI NUGRAHA**  
 Tempat Tanggal Lahir: Jakarta Selatan / 09 Maret 1989  
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Pertahanan  
 Alamat : Perumnas Dobok Blok D/3, Kec. Lima Kaum  
 Kartu Identitas : KTP.1304040903890001  
 Maksud dan Objek : Izin Penelitian  
 Judul : **“ KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH PENEGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 GUNA Mendukung Keamanan Nasional (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT “**  
 Lokasi Penelitian : Museum Istano Basa Pagaruyung  
 Waktu : 28 September 2020

Dengan ini menerangkan bahwa **BAYU ANGGI NUGRAHA**, telah menyelesaikan rangkaian/proses penelitian di komplek Istano Basa Pagaruyung dengan judul diatas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 November 2020

**PENGELOLA ISTANO BASA PAGARUYUNG**

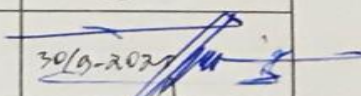

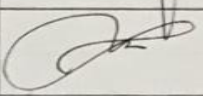
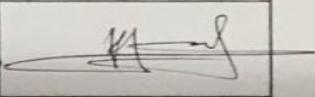
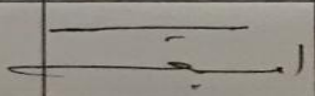
  
**RIDWAN, S.Sos**  
 NIP. 19710716 199303 1 005

## LAMPIRAN-16

## Absensi Narasumber


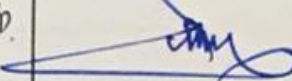
**DAFTAR HADIR INTERVIEW INFORMAN**

A. Instansi Pemerintah

No	Nama dan Jabatan	Nama Instansi	Tanda Tangan dan Tanggal Interview
	TRIAMWIN, ST / KALAKSA	BPBD TD	 30/9-2023
	FELYSOMNEVIL, S.Si	BPBD TANAH DATAR	
	SOFYAN AZ, ST	Kabid RR-BPBD TANAH DATAR	
	RIDWAN S.SOS. / Ka. urt.	Istawa Basa paganyung	
	Yoseptian Suhari. Spd. I	Guide	

## DAFTAR HADIR INTERVIEW INFORMAN

## A. Instansi Pemerintah

No	Nama dan Jabatan	Nama Instansi	Tanda Tangan dan Tanggal Interview
1	Ms. Roza Mardiah. Skep. M.kep	kabid Pzp Dinkas. T. Darak	
2.	Irwandi, SIP, M.Si	Setoran Daerah Kab. Td.	

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Bayu Anggi Nugraha asal Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 09 Maret 1989. Anak kedua dan putra pertama dari pasangan Bapak Marnizon Mukhtar (alm) dan Ibu Adri Yohendri. Menyelesaikan pendidikan SDN 05 Pabalutan lulus tahun 2001, SMPN 01 Rambatan lulus tahun 2004, SMAN 01 Rambatan lulus tahun 2007, Sarjana Pendidikan (S.Pd) Bimbingan Konseling di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) lulus tahun 2018 dan pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Sejak kuliah S-1 peneliti aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Peneliti merupakan *founder* dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M) IAIN Batusangkar pada tahun 2016 dan merupakan *first leader* di ukm tersebut. Peneliti juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan seperti paduan suara SVARA Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Peneliti juga merupakan *Founder* dari Duta Generasi Berencana di Kabupaten Tanah Datar.

Peneliti memiliki tulisan yang telah publish pada Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (JIPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan judul “Peran Pangkalan TNI AL Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Wilayah Kerjanya”.

Penghargaan yang pernah diperoleh berupa Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik Pendidikan S-1 IAIN Batusangkar (2014-2018), Beasiswa Kementerian Pertahanan Pendidikan S2 UNHAN (2019-2021), Lulusan terbaik pada Jurusan Bimbingan Konseling IAIN Batusangkar dengan IPK 3.90.